



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN PENUGASAN
DANA DIPA UNNES TAHUN 2021
Nomor: 177.26.4/UN37/PPK.3.1/2021

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.** : **Pejabat Pembuat Komitmen** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/3/UN37/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr NGABIYANTO M. Si** : Dosen pada FIS Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Penugasan Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
Dasar Hukum

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : 302/P/2018 tanggal 26 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Pascasarjana Antarwaktu Universitas Negeri Semarang.
4. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/3/UN37/HK/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 Universitas Negeri Semarang.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/335/UN37/HK/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2021.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DIPA : SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020.

PASAL 2
Ruang Lingkup Perjanjian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Penugasan tahun 2021 dengan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK DALAM PEREKRUTAN GURU DI JAWA TENGAH".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran UNNES Nomor SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020.

PASAL 4
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) diawal dari total dana penelitian yaitu sebesar Rp. Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB dan instrumen penelitian ke SIPP
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama Dr NGABIYANTO M. Si dengan nomor rekening 0232005197.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 26 April 2021** dan berakhir pada **Tanggal 13 November 2021**.

Pasal 6
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib seperti tersebut di bawah:
Luaran Wajib : Hak Cipta Granted dan Publikasi di Prosiding Seminar Internasional Accepted.
- (2) **Semua anggota peneliti** harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel **disebutkan nomor kontrak pada bagian "ucapan terimakasih"**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib sebagaimana pada pasal 6

Pasal 8
Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah hasil revisi proposal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, RAB, dan instrumen penelitian ke SIPP dan menyerahkan *hardcopy* dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **8 Mei 2021**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi Catatan Harian beserta mengunggah bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana, laporan penggunaan anggaran, SPTB (70%), dan Laporan kemajuan ke SIPP serta menyerahkan *hardcopy* dokumen masing-masing 1 (satu) eksemplar **paling lambat 7 Oktober 2021**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengisi Catatan Harian beserta mengunggah bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran anggaran 100%, Laporan Akhir, Poster, Artikel Ilmiah, Profil dan SPTB (100%) pada SIPP **paling lambat 13 November 2021**
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Catatan Harian, Laporan Akhir, Laporan Penggunaan Anggaran beserta bukti-bukti pengeluaran, artikel ilmiah masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **31 Desember 2021**
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti luaran wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada tanggal **31 Agustus Tahun 2022** dengan status **PUBLISHED**
- (6) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format font Times New Romans Ukuran 12 spasi 1,5
 - b. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - c. Warna *cover* (disesuaikan dengan ketentuan di panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021)
 - d. Di bawah bagian sampul *cover* ditulis:

Dibiayai oleh:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor : SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, sesuai dengan
Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2021
Nomor 177.26.4/UN37/PPK.3.1/2021 tanggal 26 April 2021

Pasal 9 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Penelitian **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam judul yang sama.

Pasal 10 **Penilaian Luaran**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas BLU UNNES.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA belum menyelesaikan** tugasnya dan atau **terlambat** mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda sebesar 1‰** (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya **5% (lima persen)** dihitung dari tanggal jatuh tempo (13 November s.d. 31 Desember 2021)
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal **31 Desember 2021**, **PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka **PIHAK KEDUA** dikenai **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana 30% dari dana penelitiannya** ke Kas BLU UNNES dan **sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut**
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal **31 Agustus 2022**, maka:
 - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda** berupa **mengembalikan dana biaya publikasi sebesar 5 %** dari total jumlah dana penelitian ke kas BLU UNNES
 - b. **PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian** pendanaan LPPM UNNES dalam kurun waktu **2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota**
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA tidak hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi **tanpa pemberitahuan** sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Tahap Kedua sebesar 30%** ke Kas BLU UNNES.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas BLU UNNES.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 14
Pajak-pajak

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 16
Integritas Akademik

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, humum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 17
Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etiket baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 18 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Tinggi Semarang

Pasal 19 **Lain-Lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 20 **Penutup**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.
NIP. 195809201985031003

PIHAK KEDUA



Dr NGABIYANTO M. Si
NIP. 196501031990021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@mail.unnes.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr NGABIYANTO M. Si
NIP : 196501031990021001
Unit Kerja : FIS
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK DALAM PEREKRUTAN GURU DI JAWA TENGAH"

yang dibiayai oleh DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Negeri Semarang Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2021 Nomor 177.26.4/UN37/PPK.3.1/2021, tanggal 26 April 2021, adalah **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke Kas BLU UNNES.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 April 2021

Yang menyatakan,
Ketua Pelaksana



Dr NGABIYANTO M. Si
NIP. 196501031990021001

Mengetahui,
Ketua LPPM UNNES



Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd.
NIP. 195809201985031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax (024) 8508087, (024) 8508089

Laman: <http://lppm.unnes.ac.id> Email: lppm@mail.unnes.ac.id

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR: B/2266/UN37.3.1/PG/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr NGABIYANTO M. Si

Alamat : FIS

Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kode Satker (677507) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 26 April 2021

Nomor : 177.26.4/UN37/PPK.3.1/2021

Pekerjaan : Penelitian Penugasan Dana DIPA UNNES Tahun 2021

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK DALAM PEREKRUTAN GURU DI JAWA TENGAH"

Nilai Kontrak : Rp 100.000.000,-

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke kas BLU sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

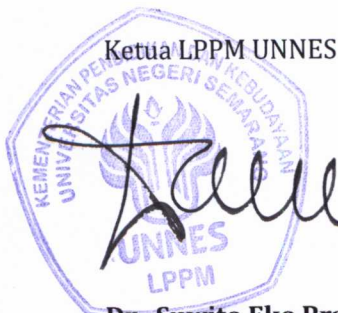
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 April 2021

Yang menyatakan
Ketua Pelaksana,



Dr NGABIYANTO M. Si
NIP. 196501031990021001



Dr. Suwito Eko Pramono M. Pd.
NIP. 195809201985031003

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PENUGASAN**



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK DALAM PEREKRUTAN
GURU DI JAWA TENGAH**

TIM PENGUSUL

Dr. Ngabiyanto, M.Si.	NIDN 0003016509
Dr. Isnarto, M.Si.	NIDN 0025026903
Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.	NIDN 0627098503
Didi Pramono, S.Pd., M.Pd.	NIDN 8852440017

MAHASISWA

Arum Yuliya Lestari	NIM 0202519004
Nailul Akhla Alfatimi	NIM 2101418026
Novi Izmi Liana	NIM 2101418081

TENAGA KEPENDIDIKAN

Ratih Dwinie Palupi, S.E., M.Si.	198003072005012002
---	---------------------------

ALUMNI

Ayom Indramayu S.Pd.	199605092020122023
-----------------------------	---------------------------

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang
Nomor: SP DIPA-023.17.2.677507/2021, tanggal 23 November 2020, sesuai dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dana DIPA UNNES Tahun 2021
Nomor 177.26.4/UN37/PPK.3.1/2021, tanggal 26 April 2021**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOVEMBER 2021**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PENUGASAN

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan PPPK dalam Perekrutan Guru di Jawa Tengah

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Ngabiyanto, M.Si.
b. NIDN : 0003016509
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Pendidikan S2/S3 : S3 Studi Pembangunan
e. Fakultas/Jurusan : FIS/ PKN
f. Alamat Surel (e-mail) : ngabiyanto@mail.unnes.ac.id

Anggota Peneliti (1) :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Isnarto, M.Si.
b. NIDN : 0025026903
c. Program Studi : Pendidikan Matematika
d. Fakultas : FMIPA

Anggota Peneliti (2) :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.
b. NIDN : 0627098503
c. Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
d. Fakultas : Fakultas Bahasa dan Seni

Anggota Peneliti (2) :

a. Nama Lengkap dan Gelar : Didi Pramono, S.Pd., M.Pd.
b. NIDN : 8852440017
c. Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
d. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Kerjasama dengan institusi lain :

a. Nama Institusi : Dinas Pendidikan Jawa Tengah
b. Alamat : Jalan Pemuda, Semarang

Mahasiswa yang Terlibat :

a. Nama/NIM : Novi Izmi Liana/ 2101418081
b. Nama/NIM : Nailul Akhla Alfatimi/ 2101418026
c. Nama/NIM : Arum Yuliy Lestari/ 0202520003

Staf Pendukung Penelitian : 1 orang: Ratih Dwinie Palupi S.E., M.Si.
Alumni terlibat Penelitian : 1 orang: Ayom Indramayu, S.Pd.

Biaya yang diperlukan :

a. Sumber dari LP2M Unnes : Rp 100.000.000,00
b. Sumber lain, sebutkan : Rp -

Jumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

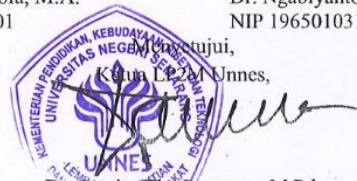
Semarang, 1 November 2021

Ketua Pelaksana,

Dr. Ngabiyanto, M.Si.
NIP 196501031990021001



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP 196308021988031001



Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
NIP 195809201985031001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	9
BAB IV METODE PENELITIAN	10
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	12
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	34
1. Artikel Ilmiah	34
2. Hak Cipta	42
3. Biodata Ketua dan Anggota	44

RINGKASAN

Tim penelitian ini terdiri atas: (1) Dr. Ir. Ngabiyanto, M.Si. (ID Sinta: 6012306, ID Scholar: gTEwKP4AAAAJ); (2) Dr. Isnarto, M.Si. (ID Scopus: 56997557000, ID Sinta: 6024468, ID Scholar: fTdJ3X0AAAAJ), (3) Asep Purwo Yudi Utomo S.Pd, M.Pd (ID Sinta: 5987497, ID Scholar: s9RlajYAAAAJ), (4) Didi Pramono, S.Pd, M.Pd. (ID Sinta: 5993910), (5) Arum Yuliyah Lestari, mahasiswa, (6) Novi Izmi Liana, mahasiswa, (7) Nailul Akhla Alfatimi, mahasiswa, (8) Ratih Dwinie Palupi, S.E., M.Si., (9) Ayom Indramayu S.Pd.

Permasalahan guru di Indonesia sampai saat ini masih menjadi kajian menarik. Alasannya, jaminan kesejahteraan guru khususnya guru honorer masih belum jelas. Keberadaan guru honorer di satu sisi dibutuhkan, namun di sisi yang lain keberadaannya justru menimbulkan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama terkait status, perlindungan dan kesejahteraannya. Adanya rekrutmen guru honorer di berbagai daerah tidak dipungkiri dimaksudkan untuk mengisi kekurangan guru. Data Kemendikbud tahun 2020 menunjukkan kekurangan guru mencapai 1.020.921 orang dengan jumlah guru pensiun 72.976 orang. Angka ini diprediksi meningkat pada tahun 2021 yaitu mencapai 1.090.678 dengan jumlah guru pensiun 69.757 orang. Kekurangan guru menjadi alasan keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan, sehingga sampai tahun 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang yang 728.461 diantaranya berstatus guru honorer sekolah.

Melihat kondisi demikian, seyogyanya kesejahteraan guru honorer menjadi prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan merubah nasib guru honorer. Ngabiyanto (2019) dalam penelitiannya menemukan lima model kebijakan penyelesaian permasalahan guru honorer, antara lain: (1) *Political Lobbying*; (2) *'The Blessings' Model after the Amendment*; (3) *The Impartial Policy Model*; (4) *The Partial Policy Model*; dan (5) *The Responsive Policy Model*. Kelima model kebijakan tersebut menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan untuk merubah status dan kesejahteraan guru honorer.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan menganalisis secara kualitatif tentang implementasi kebijakan PPPK di Jawa Tengah; (2) Mendeskripsikan bagaimana persepsi guru terhadap implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah; (3) Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lingkup penelitian ini adalah guru-guru, baik guru PNS maupun honorer di Jawa Tengah. Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan PPPK, analisis, dan evaluasinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Validitas data akan diuji dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Dinamika politik kebijakan perekrutan PPPK menunjukkan bahwa profesi guru tidak bisa terlepas dari intervensi politik praktis. Banyaknya jumlah guru secara nasional menjadi posisi yang strategis, sehingga kekuasaan perlu mengambil peran dalam setiap dinamika kebijakan yang menyangkut guru. Dinamika ini tidak menjadi masalah selama guru tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Masyarakat perlu mengawal agar guru tidak lagi menjadi alat politik

seperti pada masa Orde Baru. Guru sebagai ASN harus netral dan secara tegas perlu didudukkan pada jalurnya, guru profesional yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan kompetensinya.

Jaminan hukum, sosial, dan ekonomi PPPK memang sudah termuat dalam serangkaian undang-undang. Namun regulasi tersebut masih memiliki celah hukum. Ditinjau dari perspektif HAM, regulasi tersebut belum menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, saling bergantung dan terkait, serta tanggung jawab negara. Negara perlu meninjau kembali dan selanjutnya memperbaiki regulasi tentang PPPK, agar lebih menjunjung tinggi hak-hak PPPK.

Kata kunci: kebijakan, guru, PPPK, implementasi kebijakan

BAB 1 PENDAHULUAN

Permasalahan guru di Indonesia sampai saat ini masih menjadi kajian menarik. Alasannya, jaminan kesejahteraan guru khususnya guru honorer masih belum jelas. Keberadaan guru honorer di satu sisi dibutuhkan, namun di sisi yang lain keberadaannya justru menimbulkan permasalahan yang belum terselesaikan, terutama terkait status, perlindungan dan kesejahteraannya. Adanya rekrutmen guru honorer di berbagai daerah tidak dipungkiri dimaksudkan untuk mengisi kekurangan guru. Data Kemendikbud tahun 2020 menunjukkan kekurangan guru mencapai 1.020.921 orang dengan jumlah guru pensiun 72.976 orang. Angka ini diprediksi meningkat pada tahun 2021 yaitu mencapai 1.090.678 dengan jumlah guru pensiun 69.757 orang. Kekurangan guru menjadi alasan keberadaan guru honorer sangat dibutuhkan, sehingga sampai tahun 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang yang 728.461 diantaranya berstatus guru honorer sekolah.

Melihat kondisi demikian, seyogyanya kesejahteraan guru honorer menjadi prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan merubah nasib guru honorer. Ngabiyanto (2019) dalam penelitiannya menemukan lima model kebijakan penyelesaian permasalahan guru honorer, antara lain: (1) *Political Lobbying*; (2) *'The Blessings' Model after the Amendment*; (3) *The Impartial Policy Model*; (4) *The Partial Policy Model*; dan (5) *The Responsive Policy Model*. Kelima model kebijakan tersebut menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan untuk merubah status dan kesejahteraan guru honorer. Model kebijakan *Political Lobbying* muncul ketika APBN tidak mampu mendanai rekrutmen CPNS/ASN sehingga untuk mengatasi kekurangan guru, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk merekrut guru tidak tetap. Model kebijakan *'The Blessings' Model after the Amendment* muncul ketika guru honorer mendapatkan berkah dari perubahan peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil menggantikan Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2005. Peraturan ini

menjadi berkah bagi guru honorer karena Guru Honorer K1 dan K2 berpeluang menjadi CPNS dan tidak terhalang dengan usia.

Model kebijakan *The Impartial Policy Model* muncul akibat dikeluarkannya PP Nomor 56 Tahun 2012 menggantikan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 yang mana Konsekuensi dari perubahan tersebut guru yang bisa diangkat jadi CPNS dari tenaga honorer adalah guru yang menjadi honorer sebelum tahun 2005 dan berusia kurang dari 35 tahun. Peraturan ini telah menghadang ribuan guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN. Model Kebijakan *The Partial Policy Model* mengeluarkan kebijakan Test Seleksi Non ASN. Istilah Non ASN ada pada peraturan kepegawaian yang memungkinkan instansi pemerintah mengangkat tenaga kontrak bukan PNS/ASN dengan dibiayai secara mandiri dengan fasilitas penggajian minimal setara dengan upah minimum regional (UMR), jaminan kesejahteraan asuransi kesehatan/BPJS. Kebijakan ini telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2019. Sedangkan model kebijakan *The Responsive Policy Model* merupakan elaborasi kebijakan Presiden Jokowi yang menghentikan sementara (moratorium) penerimaan aparatur sipil negara (ASN) selama lima tahun yang kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Kebijakan pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menarik untuk dikaji dan diteliti. Kebijakan ini muncul bersamaan dengan kebijakan pelarangan rekrutmen guru honorer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dengan tegas menjelaskan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer selain melalui kebijakan pengangkatan ASN adalah melalui pengangkatan PPPK. Namun demikian kebijakan pengangkatan PPPK juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini sebagaimana diberitakan Kompas (2020) kurang lebih 34.000 ribu guru honorer yang lulus PPPK tahun 2019 khususnya kategori K2 masih menanti kejelasan terkait Surat Pengangkatan PPPK.

Atas dasar uraian latar belakang di atas, penelitian tentang implementasi kebijakan PPPK menarik dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah

kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan guru honorer serta apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPPK DALAM PEREKRUTAN GURU DI JAWA TENGAH”**. Dipilihnya Jawa Tengah sebagai lokus penelitian karena Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang sudah menerapkan kebijakan PPPK bagi guru honorer.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merupakan lanjutan dari Disertasi Ngabiyanto (2019) tentang Guru Honorer Antara Pengabdian, Tuntutan Ekonomi, dan Kebijakan Publik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran dan kontribusi guru honorer ditunjukkan dengan kemampuan dan kompetensinya sebagai guru yang dapat membelajarkan standar isi dan menjalankan standar proses pendidikan, hal ini dibuktikan dengan hasil perbandingan menggunakan uji t hasil UKG antara guru ASN dan guru honorer yang tidak ada bedanya, guru honorer telah mengisi kekosongan guru sehingga rasio guru dan murid menjadi seimbang. Selain itu guru honorer juga memiliki prestasi dalam berbagai kompetisi. Perjuangan guru honorer untuk memperbaiki status dan kesejahteraan dilaksanakan melalui *political lobbying* dengan membentuk organisasi perjuangan guru di luar PGRI. Reaksi pemerintah dalam merespon hal ini dapat diklasifikasikan dalam lima model yaitu (1) model lobi politik; (2) model berkah amandemen; (3) model musibah amandemen; (4) model Kota Semarang; dan (5) model Jokowi.

Rekomendasi penelitian ini adalah terkait dengan mekanisme rekrutmen guru harus melalui proses induksi selama 5 tahun sebelum menjadi ASN. Melalui proses induksi ini guru akan dilihat kinerja dan kompetensinya, jika layak maka akan dilanjutkan pada proses pemberkasan menuju ASN.

Tahun 2018 pemerintah sebenarnya sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah meminta agar instansi yang terkait dengan peraturan tersebut agar skema PPPK bisa diterima dan menjadi solusi dalam penyelesaian tenaga honorer. Konsekuensinya semua instansi pemerintah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer. Aturan ini juga membuka kesempatan bagi profesional dan juga tenaga honorer yang telah melebihi batas usia ASN, untuk menjadi ASN dengan status PPPK.

Tahun 2021 ini akan segera dibuka penerimaan PPPK, seleksi ini ditujukan bagi guru honorer, dan yang termasuk kategori 2 atau eks Tenaga Honorer Kategori 2. Kriteria guru yang dapat mengikuti seleksi PPPK tahun 2021

adalah (1) guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang belum lulus seleksi CASN di tahun sebelumnya; (2) terdaftar di Dapodik; (3) memiliki sertifikat pendidik atau telah lulus PPG yang belum mengajar.

Hasil penelitian terdahulu telah banyak memotret tentang implementasi kebijakan PPPK, analisis, dan evaluasinya. Fahrani (2019) dalam penelitiannya tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Kota Banda Aceh: *Non-Ongoing Employee Management In Banda Aceh* menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi rekrutmen PPPK adalah formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai yang sebenarnya sehingga jumlah PNS yang masuk dan jumlah PNS yang pensiun tidak sebanding, tidak ada keinginan dalam diri PNS tersebut untuk bekerja setelah PNS yang bersangkutan melakukan penyesuaian ijasah (PI) dan PNS yang sebelumnya melakukan pekerjaan tertentu namun setelah golongan ruangnya naik maka akan memilih menduduki jabatan struktural. Sedangkan manajemen PPPK yang telah diterapkan selama ini adalah adanya rekrutmen dan seleksi yang transparan, gaji yang pasti, hak cuti dan pemberian santunan. Sehingga apabila ketentuan PPPK dalam UU ASN diterapkan maka Pemerintah Kota Banda Aceh telah siap.

Mahaputra, dkk (2015) menyimpulkan bahwa pengaturan pengadaan PPPK dalam penyusunan kebutuhan pegawai adalah tidak jelas. Istiqlallia (2018) menambahkan bahwa pengangkatan PPPK harus diikuti dengan perlindungan hukum yang bertujuan agar nantinya aparatur negara yang diangkat memberikan manfaat untuk negara terutama untuk memberikan pelayanan.

Tobroni (2020) dengan keras mengkritik regulasi PPPK ditinjau dari perspektif HAM. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa beberapa perlakuan kepada PPPK dalam regulasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM. Beberapa prinsip yang belum terakomodasi adalah prinsip kesetaraan, non diskriminasi, saling terkait, saling bergantung dan tanggung jawab negara. Dengan melakukan intertektualitas antara teks hukum dalam regulasi PPPK dengan teks lain, penelitian ini menemukan beberapa hal yang mendorong urgensi peninjauan ulang regulasi PPPK berprinsip HAM. Regulasi PPPK mencerminkan nalar mekanis negatif yang digunakan negara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab negara

dalam melindungi kepentingan PPPK, sehingga memproduksi regulasi yang sebenarnya tertinggal dibanding regulasi lain dalam perlindungan hak pegawai kontrak. Selain itu, regulasi PPPK juga menunjukkan kemunduran negara dalam memformulasikan indikator pemenuhan hak atas pekerjaan.

Khairunnisa, dkk (2019) juga mengkritisi kebijakan PPPK, dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru PNS dibandingkan guru PPPK. Namun kedua jenis guru tersebut memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dalam mendidik. Mereka juga memiliki tugas utama dan tugas tambahan yang sama. Dengan kata lain, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru.

Wulandari, dkk (2018) Kedudukan hukum PPPK merupakan bagian dari ASN, memiliki kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil, namun memperoleh hak yang berbeda dengan pegawai negeri sipil. Perlindungan hukum PPPK menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK.

Remaja, dkk (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa norma dalam undang-undang PPPK yang dinilai mengakibatkan ambiguitas norma terkait perlindungan hukum PPPK, sejalan dengan kedudukan PPPK, pembatasan kewenangan PPPK, dan mekanisme penyelesaian sengketa PPPK. Dalam pengaturan ini, pembuat undang-undang melakukan sinkronisasi keberadaan PPPK dan PNS atas nama pegawai ASN. Padahal, PNS dan PPPK adalah dua model pegawai yang berbeda, meski keduanya merupakan pegawai ASN. Rekomendasi penelitian ini adalah revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan maksud memisahkan keberadaan PPPK dan PNS, dengan demikian PPPK menjadi pegawai bebas, mandiri dan memiliki keahlian dan keterampilan tertentu melalui penataan tata kelola kepegawaian dengan menitikberatkan pertimbangan filosofi, sosiologi dan yudikatif serta mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Lohida (2015) sebaliknya menjelaskan bahwa dengan adanya UU ASN, peran dan fungsi PPPK menjadi lebih memiliki kejelasan (clarity) dalam beberapa hal yaitu aspek legal standing, keterpaduan sistem kepegawaian, profesi dan kesejahteraan, kompetisi dan promosi, serta efektivitas dan efisiensi aturan. Dengan demikian, ambiguitas peran, fungsi, dan nasib pegawai pemerintah non

PNS yang sekian lama belum diakomodir dalam Undang-Undang kepegawaian sebelumnya, sekarang sudah diperbaharui dan diperjelas dalam UU ASN.

Malwa (2019) menjelaskan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 22 tentang Hak PPPK di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sudah berjalan cukup baik. Tingkat keberhasilan kebijakan sudah baik, pegawai PPPK sudah mendapat hak yang hampir sama dengan pegawai PNS kecuali hak pensiun karena pegawai PPPK bersistem kontrak. Namun, dalam pemberian hak pada pegawai PPPK masih sering terlambat dari waktu yang ditetapkan. Keterlambatan ini tentunya harus diatasi agar tidak mengganggu kinerja pegawai.

Qomarani (2020) menegaskan bahwa apabila berbagai permasalahan seputar PPPK tidak segera diselesaikan, maka seiring berjalannya waktu keberadaan PPPK di masa yang akan datang akan hilang dan tenggelam dalam menelan masalah. Dalam hal ini, Pemerintah (Presiden) selaku legislator dan pemangku kepentingan lainnya harus segera menetapkan peraturan pelaksana yang lebih spesifik dan rinci dalam upaya memaksimalkan rekrutmen PPPK yang diharapkan dilakukan secara profesional, transparan dan obyektif, bebas dari intervensi politik dan bersih dari KKN. Tentunya hal ini dinilai mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PPPK dan pegawai honorer / tidak tetap lainnya yang telah ada dan diakui selama ini.

1. Road Map Penelitian

Berdasarkan Renstra Bisnis Universitas Negeri Semarang tahun 2020-2024 telah ditetapkan target-target yang harus dicapai UNNES. Pada IKK 3.3.5 yaitu Jumlah Calon guru bersertifikat PPG yang dihasilkan UNNES, UNNES memiliki tanggung jawab bahwa adanya pengawalan terhadap lulusan secara khusus dan guru secara umum. Oleh karena itu, peneliti Menyusun road map sebagai berikut.

25-30 tahun			Unnes menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional dengan implementasi pembelajaran berkelanjutan
16-20 tahun			Menjadi rujukan dalam keilmuan, pengembangan, implementasi dalam pendidikan berkelanjutan
11-15 tahun		Hilirisasi pengembangan pendidikan berkelanjutan	Menjadi branding serta konsep pengembangan dan implementasi pendidikan berkelanjutan
6-10 tahun	Pengembangan pendidikan berkelanjutan	Pengembangan pembelajaran berkelanjutan	Penerapan pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan
1-5 tahun	Penelitian mengenai Model guru dalam inovasi pembelajaran	Penelitian mengenai kebijakan terhadap guru penggerak dalam penguatan sumber daya manusia	Penelitian mengenai implementasi kebijakan guru dan dampaknya terhadap pendidikan
Luaran	- artikel jurnal internasional bereputasi.	- Model kebijakan terhadap guru - artikel jurnal internasional bereputasi.	- Implementasi kebijakan terhadap guru penggerak - artikel jurnal internasional bereputasi.

Gambar 1. Road Map Penelitian

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana implementasi kebijakan PPPK di Jawa Tengah?
- b. Bagaimana persepsi guru terhadap implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah?
- c. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. mengkaji dan menganalisis secara kualitatif tentang implementasi kebijakan PPPK di Jawa Tengah;
- b. Mendeskripsikan bagaimana persepsi guru terhadap implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah;
- c. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah.

BAB 4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sebagian individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh berdasarkan dengan keadaan dari lapangan secara luas, mendalam dan menyeluruh, serta mencakup informasi mengenai fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian (Creswell, 2012).

Lingkup penelitian ini adalah guru-guru, baik guru PNS maupun honorer di Jawa Tengah. Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan PPPK, analisis, dan evaluasinya. Sumber data primer penelitian ini adalah guru PNS dan honorer di Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah. Informan kunci dalam penelitian ini adalah beberapa guru PNS dan honorer di Jawa Tengah, dengan informan pendukung dari organisasi-organisasi yang membawahi guru. Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari dokumentasi kebijakan terkait PPPK dan laporan-laporan berita di berbagai media.

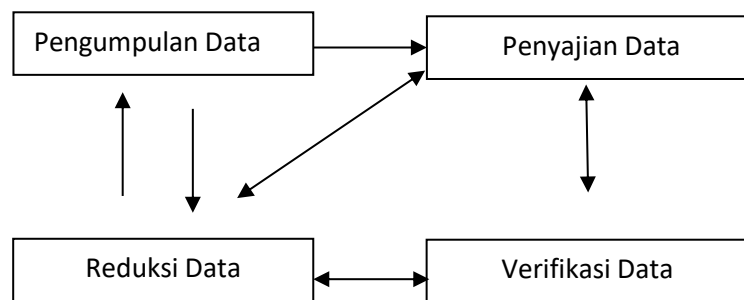
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Proses pengumpulan data ini dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi selama masa Pandemi Covid-19. Observasi akan dilakukan terhadap dinamika kebijakan PPPK dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer. Wawancara akan dilakukan terhadap semua informan, guna menggali data secara mendalam tentang implementasi kebijakan PPPK, analisis, dan evaluasinya.

Focus Group Discussion akan mendatangkan perwakilan guru PNS dan honorer di Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah untuk lebih mendalami tentang implementasi kebijakan PPPK, analisis, dan evaluasinya. Teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumentasi juga akan sangat diperlukan sebagai

data dukung tentang tentang implementasi kebijakan PPPK, analisis, dan evaluasinya.

Validitas data akan diuji dengan teknik triangulasi. Menurut Nasution (2003) teknik triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang akan dilakukan diantaranya (1) membandingkan data yang diperoleh dari informan kunci dengan informan pendukung; (2) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi; (3) membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan setiap narasumber; (4) membandingkan data yang disampaikan di hadapan umum dengan data yang disampaikan secara personal; (5) dan membandingkan data dari berbagai periode waktu tertentu

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1992 : 16) mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Rangkaian ketiga alur tersebut digabungkan oleh peneliti dengan analisis menggunakan pendekatan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Ketiga alur kegiatan analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Bagan 2. Model Analisis Data

Sumber: Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013 : 338)

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah

Pemerintah Jawa Tengah di tahun 2021 kembali membuka seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibagi menjadi dua kategori, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dasar hukum pelaksanaan Seleksi ASN Tahun 2021 diantaranya (1) PermenpanRB No. 27 Tahun 2021 mengenai Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; (2) PermenpanRB No. 28 Tahun 2021 mengenai PPPK untuk Jabatan Guru pada Instansi Daerah; (3) PermenpanRB No. 29 Tahun 2021 mengenai PPPK untuk Jabatan Fungsional; (4) KepmenpanRB No.980 Tahun 2021 mengenai Persyaratan STR untuk melamar jabatan fungsional Kesehatan; (5) KepmenpanRB No.981 Tahun 2021 mengenai Persyaratan Sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar jabatan fungsional PPPK; dan (6) Peraturan BKN No. 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (bkd.jatengprov.go.id).

Kategori PNS ditujukan untuk mengisi formasi jabatan-jabatan fungsional, kategori PPPK untuk non-guru, sedangkan untuk formasi guru difokuskan pada PPPK. Rincian formasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rincian Formasi ASN Jawa Tengah

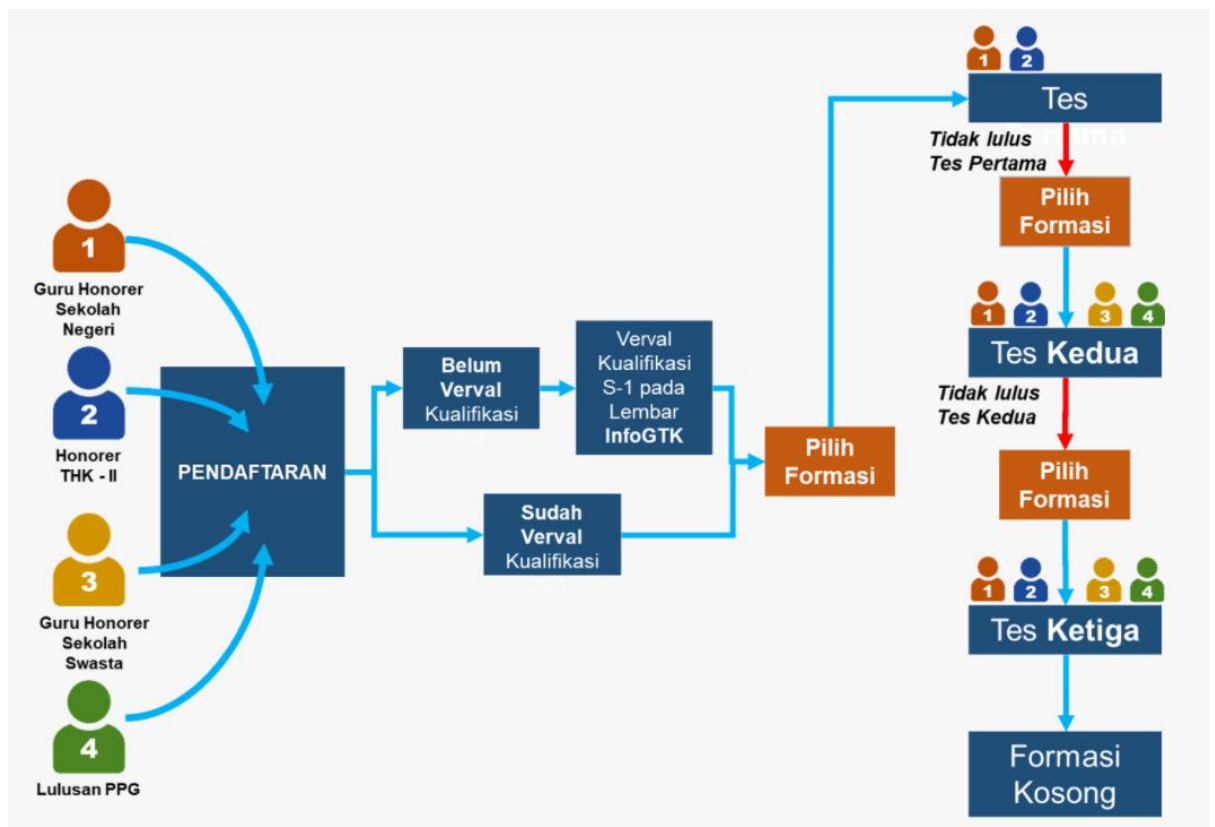
No	Formasi	Jumlah
1	CPNS Pegawai Pemerintahan	301
2	PPPK Non-Guru	528
3	PPPK Guru	10.819

Sumber: bkd.jatengprov.go.id

Pendaftaran PPPK Guru dilakukan secara daring melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>. Dokumen yang perlu disiapkan oleh pelamar untuk diunggah ke dalam portal SSCASN di antaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah dan transkrip nilai asli, serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Semua pendaftaran seleksi PPPK dilakukan melalui satu portal SSCASN yang diintegrasikan dengan sejumlah data, yakni (1) data Nomor Induk Kependudukan

(NIK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil); (2) data guru non-ASN dan lulusan PPG untuk pelaksanaan seleksi PPPK Guru yang bersumber dari Kemendibudristekdikti; (3) data Tenaga Honorer K2 BKN; dan (4) data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbudristekdikti (bkd.jatengprov.go.id).

Alur pendaftaran PPPK dapat dilihat pada skema di bawah ini.



Gambar 1. Alur Penerimaan PPPK

Alur penerimaan PPPK dimulai dari pendaftaran akun, selanjutnya pelamar melakukan verifikasi dan validasi ijazah atau kualifikasi akademik (S-1) pada Lembar Info GTK. Tahap selanjutnya peserta memilih formasi yang tersedia, sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki. Pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan Data Kualifikasi Pendidikan dan/atau Sertifikat Pendidik yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut: (a) dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar

wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan linier; (b) formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dapat dilamar oleh pelamar lain; dan (c) dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya (gurupppk.kemdikbud.go.id).

Seleksi PPPK terdiri atas tiga tahap, yaitu *pertama* seleksi administrasi. Peserta menggunggah dokumen persyaratan yang diperlukan dan menunggu pengumuman kelulusan, jika dinyatakan lulus maka pelamar berhak mengikuti tahap selanjutnya.

Kedua, seleksi kompetensi yang meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Seleksi kompetensi ini dilaksanakan menggunakan *computer assisted test* (CAT) yang dikelola di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Materi seleksi kompetensi akan diujikan dalam bentuk tes objektif terdiri atas: (1) Kompetensi Teknis, seleksi ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; (2) Kompetensi Manajerial, seleksi ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola organisasi; (3) Kompetensi Sosial Kultural, seleksi ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Seleksi wawancara ditujukan untuk mengukur integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK ()).

Tahapan ujian kompetensi ada tiga, yakni *pertama* Seleksi Kompetensi I. Seleksi kompetensi I diperuntukkan bagi THK-II sesuai dengan pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan terdaftar di Dapodik. Pelamar seleksi kompetensi I wajib untuk memilih formasi di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, yang

sesuai dengan kualifikasi akademik/sertifikat pendidik. Apabila tidak tersedia formasi yang sesuai di sekolahnya, pelamar diarahkan untuk memilih formasi yang sesuai pada sekolah lain dalam satu daerah sesuai dengan kewenangan pengelolaan pendidikan.

Kedua, Seleksi kompetensi II diperuntukkan bagi: (1) Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi I; (2) Guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik; dan (3) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbudristek. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud angka (1) memilih ulang formasi. Sedangkan, Guru non-ASN sebagaimana dimaksud angka (2) dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru angka (3) memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali. Bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud angka (3) memilih formasi sesuai dengan domisili pelamar dan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah kewenangan pengelolaan pendidikan serta sesuai dengan kualifikasi akademik/sertifikat pendidik.

Ketiga, Seleksi Tahap III Seleksi kompetensi III dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut: (1) Pelamar dari THK-II yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II; (2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi I dan II; (3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi II; dan (4) Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi II.

Pelamar tersebut di atas dapat mengikuti seleksi kompetensi III dengan melakukan pemilihan formasi ulang melalui portal SSCASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya. Pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar. Dalam rangka pemenuhan formasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru, pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut: (1) memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik; (2) jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang kosong pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama

dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada Seleksi Kompetensi III; dan (3) bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Penentuan sekolah yang akan diisi kekosongannya berdasarkan: (1) peringkat mutu satuan Pendidikan; (2) Jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada Seleksi Kompetensi III; dan (3) Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Seleksi berdasarkan peta kebutuhan guru.

Pelamar memiliki hak untuk sanggah hasil seleksi pada tiap tahap di atas. Masa sanggah dibuka setelah masing-masing tes disampaikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan akun pendaftaran paling lama tiga hari sejak diumumkan. Dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan/memperbarui dokumen lamaran. Selanjutnya panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi hasil tes di tiap-tiap seleksi kompetensi yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hasil verifikasi diumumkan melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id> dan laman <https://gtk.kemdikbud.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Durasi dan bobot masing-masing tahap seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut.

Tipe Konten	Butir Soal	Waktu (menit)	Bobot
Kompetensi Teknis (sesuai mata pelajaran)	80-100	120	60%
Manajerial	25	25	40%
Sosio-Kultural	20	15	
Wawancara	10	10	
Jumlah	135-155	170	100%

Sumber: <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/webpppk/>

Seleksi pada ujian kompetensi ini dilengkapi dengan kebijakan afirmasi. Pelamar akan diberi tambahan nilai/afirmasi pada penilaian Kompetensi Teknis dengan kriteria tertentu. Tambahan nilai/afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Nilai total Kompetensi Teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis. Adapun jenis-jenis tambahan nilai/afirmasi sebagai berikut:

Jenis Tambahan Nilai	Jumlah Tamabahan Nilai	Keterangan
Sertifikat Pendidik	100% dari nilai maksimal Kompetensi Teknis	Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasis dilamar
Usia	15% dari nilai maksimal Kompetensi Teknis	Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data dapodik)
Disabilitas	10% dari nilai maksimal Kompetensi Teknis	Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video
Guru Honorer THK-II	10% dari nilai maksimal Kompetensi Teknis	Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data dapodik)

Sumber: <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/webpppk/>

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah. Keputusan PPK Instansi Daerah disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK. Penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK Instansi Daerah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Skenario Pemerintah pada kebijakan penerimaan ASN tahun 2021 sepertinya memang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer/guru swasta yang sudah mengabdikan di sekolah selama sekian tahun, tetapi

tidak bisa menjadi PNS karena terkendala usia. Batasan usia pendaftar PPPK pun tidak sama dengan PNS, yakni usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021, guru yang bisa mendaftar menjadi PPPK diantaranya (1) Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN (individu yang terdaftar dalam database eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara); (2) Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristekdikti; (3) Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristekdikti; (4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristekdikti.

Ketentuan di atas menjadikan lulusan sarjana pendidikan yang belum memiliki NUPTK, apalagi belum pernah menjadi guru di sekolah negeri maupun swasta tidak bisa mendaftar pada formasi PPPK guru. Hal ini di satu sisi menguntungkan guru honorer/guru swasta, namun tidak menguntungkan bagi *fresh graduate*. Alternatif solusi yang bisa ditempuh oleh *fresh graduate* adalah mengikuti PPG Prajabatan atau mendaftar pada formasi ASN non guru pada kementerian selain Kemendikbudristekdikti. Setelah berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK memang terdapat ketentuan tentang larangan perekrutan Pegawai tidak tetap/honorer untuk mengisi jabatan ASN di instansi pemerintahan. Oleh karena itu diskresi tidak dapat lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, namun dapat dilakukan melalui usul formasi CPNS dan/atau PPPK (Juliani, 2019).

Penghentian rekrutmen guru PNS menjadi PPPK tentu masih akan tetap menyisakan masalah ke depannya (Pangestuti, Wulandari, Jannah, Setiawan, 2021). Yurikosari (2016) menilai bahwa terjadi ambivalensi maupun ambiguitas berdasarkan UU ASN dengan UU Ketenagakerjaan mengenai keberadaan PPPK antara lain waktu perjanjian kerja, hak upah yang tidak ada standar minimum, mekanisme penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dan terkait cara

penyelesaiannya, serta apa kompensasi atau akibat hukum bagi parapihak, khususnya PPPK.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah yang menaungi guru mengkritik mekanisme perekrutan PPPK. PGRI meminta agar Kemendikbudristek meninjau ulang kebijakan rekrutmen PPPK Tahun 2021, karena dinilai tidak mempertimbangkan keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer. Pengabdian guru honorer yang begitu lama tidak boleh diabaikan dalam proses seleksi PPPK. Rekrutmen PPPK di daerah terdepan, terluar, tertinggal sebaiknya dilakukan melalui seleksi antarsesama guru honorer di daerah itu (nasional.tempo.co).

PGRI juga meminta Kemendikbudristekdikti meninjau ulang tingkat kesulitan soal ujian kompetensi teknis dalam seleksi PPPK yang dinilai terlalu menekankan pada aspek kognitif. Seleksi mestinya didasarkan pada nilai kumulatif yang mencakup linieritas, masa kerja, portfolio, prestasi, nilai seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan hasil wawancara (nasional.tempo.co).

Beberapa pihak menyampaikan argumennya terkait dengan rekrutmen PPPK ini. Qomarani (2020) merespons kehadiran PPPK sebagai suatu anomali dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Alih-alih sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan guru honorer, rekrutmen PPPK memunculkan berbagai permasalahan dan bagaimana ke depan PPPK akan bersentuhan dengan Tenaga Ahli.

5.2 Persepsi Guru terhadap Implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa persepsi guru terhadap kebijakan PPPK di Jawa Tengah. Persepsi tersebut tergambar dalam beberapa temuan berikut.

5.2.1 Pemahaman Mengenai Guru PPPK

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Formasi seleksi guru honorer PPPK 2021 mencapai 1 juta. Hal ini berdasarkan data Dapodik 2020 bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri, di luar guru yang berstatus PNS yang saat ini mengajar, mencapai satu juta guru.

Berdasarkan pemahaman dasar tersebut, ada beberapa simpulan yang ditemukan. Antara lain sebagai berikut.

1) Guru memahami mengenai perekrutan guru PPPK

Rekrutmen guru PPPK 2021 ini dipahami oleh guru sebagai rekrutan terbuka bagi guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar. Guru PPPK merupakan guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas mengajar.

2) Pemahaman CPNS, PNS, dan PPPK

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan diberikan gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan. Adapun besaran gaji PPPK merupakan besaran gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. PPPK juga diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja yang terdiri atas tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya.

Tunjangan PPPK ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Gaji dan tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan Gaji

dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, jika memenuhi persyaratan dan lolos ujian maka CPNS akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Menurut PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya. PNS dapat mengisi seluruh jabatan ASN, memiliki jenjang karier dan bisa menempati hingga jenjang pimpinan utama. PNS berstatus pegawai tetap sedangkan PPPK merupakan pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu.

PNS memiliki NIP secara nasional. Usia paling rendah untuk menjadi PNS adalah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Besaran gaji PNS berdasarkan pada perundang-undangan dan berhak untuk mendapat tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya. PNS juga berhak untuk mendapat dana pensiun sedangkan PPPK tidak memiliki hak untuk mendapat dana pensiun. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, berikut syarat-syarat pegawai honorer agar bisa menjadi mengikuti PPPK, antara lain: Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 tahun atau lebih; Tidak pernah diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta; Tidak menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis; Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

3) Pemahaman syarat mendaftar PPPK Tahun 2021

Awal munculnya formasi PPPK ternyata membuat bingung guru dalam pemahaman syarat. Setelah adanya sosialisasi di sekolah dan pihak terkait, pemahaman mereka menjadi lebih baik. Sebagian berproses menyiapkan dan sebagian menunggu informasi lanjutan.

Berikut ini adalah syarat atau kriteria yang dapat mengikuti seleksi PPPK 2021. (1). Guru honorer di sekolah negeri dan swasta (termasuk guru eks-Tenaga Honorer Kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK di tahun sebelumnya). (2). Terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). (3). Lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.

Sementara, berikut adalah kebijakan seleksi PPPK tahun 2021: (1). Semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas satu juta guru. Maka dari itu, agar pemerintah bisa mencapai target satu juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan pemerintah. (2). Setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, pendaftar dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali di tahun yang sama atau di tahun berikutnya. (3). Kemdikbud menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. (4). Pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK. (5). Biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemdikbud.

4) Perbedaan PPPK Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Terdapat perbedaan penting dan transformatif antara seleksi PPPK tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbedaan seleksi PPPK 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya. (1). Formasi Guru Pada seleksi PPPK tahun-tahun sebelumnya, formasi guru PPPK terbatas. Pada PPPK 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi PPPK hingga batas satu juta guru. Agar

pemerintah bisa mencapai target satu juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. (2). Ujian Seleksi Tahun-tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak satu kali per tahun. Tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi (di tahun yang sama atau berikutnya). (3). Materi Persiapan Sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Tahun depan, Kemdikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. (4). Anggaran Gaji Pada PPPK 2019, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK. Tahun depan, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK. (5). Biaya Penyelenggaraan Tahun lalu, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Tahun 2021, biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemdikbud.

5) Menaikkan Standard Guru

Tahun ini pemerintah meniadakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru. Sebagai gantinya, guru akan diangkat melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini menuai kontroversi.

Dalam keterangannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan batas PPPK akan dibuka hingga jumlahnya mencapai 1 juta guru nantinya. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan PPPK ini merupakan satu solusi untuk mengatasi masalah guru honorer atau guru kontrak di daerah-daerah yang selama ini kesejahteraannya masih memprihatinkan.

Banyak guru yang gajinya jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) daerah bersangkutan. Banyak yang akhirnya memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengojek, membuka lembaga les belajar, atau mengajar di banyak tempat, sehingga justru tidak optimal dalam mendampingi siswa-siswinya belajar.

Kebijakan PPPK agaknya menjadi semacam kompromi untuk menaikkan standar gaji guru honorer, namun statusnya pada hakikatnya tetap, yaitu tetap saja merupakan guru kontrak yang bisa saja diputus kontrak kerjanya dan tidak mendapat pensiun. Alasan lain sebagaimana dikemukakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa guru yang berstatus setelah 4 atau 5 tahun mengajar minta pindah dan akhirnya mengacaukan distribusi guru secara nasional.

Namun alasan tersebut sebenarnya tidak semata-mata hanya dapat diatasi melalui kebijakan PPPK. Kebijakan ikatan dinas dapat saja sebenarnya diperbarui agar distribusi guru tetap merata di seluruh Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bereaksi keras dengan menyatakan bahwa kebijakan PPPK ini melukai para guru, bahkan merendahkan martabat guru.

Alasan utama dari penolakan terhadap PPPK adalah hilangnya kepastian kerja, karena PPPK merupakan mekanisme kontrak kerja antara guru dan pemerintah. Guru yang berstatus sebagai PPPK merupakan tenaga kontrak, minimal dikontrak selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali. Artinya, bisa saja guru PPPK tidak diperpanjang lagi kontraknya sebagai guru.

6) Soal Kesejahteraan

Sebenarnya sejak lama isu kesejahteraan guru menjadi polemik. Bukan saja soal gaji guru honorer yang jauh di bawah UMR, melainkan juga kesejahteraan dan tunjangan guru swasta maupun yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika ditarik ke belakang, munculnya kebijakan sertifikasi guru juga didasari oleh motif peningkatan kesejahteraan guru, oleh karena itu banyak studi menyatakan bahwa sertifikasi guru tidak serta merta meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Terlepas dari problem yang melingkupinya, kesejahteraan guru menjadi hal yang dituntut oleh para guru sejak lama walaupun dalam realitasnya tidak selalu bisa seiring sejalan dengan mutu guru. Lebih lanjut, kesejahteraan guru menjadi isu sentral berkaitan dengan penghargaan dan pemuliaan martabat guru. Secara teoretik, posisi guru sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Artinya, guru menjadi garda depan dari salah satu upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Penghargaan terhadap guru sudah sewajarnya diberikan karena posisinya yang sangat vital tersebut. Namun penghargaan tersebut tentu harus sesuai dengan kinerja guru. Kebijakan sertifikasi guru menjadi masuk akal di sini. Namun ketimpangan masih terjadi, yakni pada guru honorer dan sekolah swasta pinggiran. Walau secara faktual mereka kinerjanya lebih bagus dari guru PNS, kesejahteraan mereka tetap memprihatinkan.

Meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan gaji dan tunjangan merupakan penghargaan yang menjadikan guru lebih dapat fokus pada tugasnya sebagai guru. Dengan gaji dan tunjangan yang cukup, guru akan dapat memfokuskan dirinya dalam menjalankan tugasnya secara profesional sebagai guru di sekolah.

Di negara-negara maju yang cukup menghargai profesi guru rata-rata memang gajinya besar seperti di Finlandia dan Singapura misalnya. Namun tentu saja besarnya gaji tersebut sebanding dengan tuntutan profesi dan kinerjanya. Belajar dari kebijakan sertifikasi guru, tentu soal kualitas guru tidak dapat ditingkatkan melalui peningkatan gaji dan tunjangan semata. Perlu juga reformasi pendidikan calon guru (pre-service teacher education) dan pelatihan guru yang berkelanjutan (in-service teacher education).

Secara sosiologis, status guru sebagai PNS merupakan jaminan kesejahteraan, oleh karenanya tetap dilirik oleh para guru. Ada kepastian soal gaji dan tunjangan, juga karier. Menjadi guru non-PNS oleh karenanya sering dipandang sebelah mata, terutama oleh kalangan yang mendambakan kepastian karier dan masa depan kerja.

Di sisi lain sebenarnya banyak juga guru yang melihat justru menjadi PNS akan banyak menghambat pencapaian diri, karena banyak sekali aturan soal penilaian angka kredit, kepangkatan, supervisi, dan lainnya yang ribet dan berbelit-belit. Beberapa studi juga bahkan menunjukkan bahwa mentalitas PNS justru menghambat capaian profesionalitas guru. Studi Bjork (2005) misalnya menunjukkan guru PNS lebih patuh pada aturan PNS ketimbang kebijakan pengembangan profesionalitas guru yang lebih esensial.

7) Kualifikasi akademik (S1) dan sertifikat pendidik

Kemdikbud RI dan jajarannya harus mempertimbangkan kembali sebagai rujukan seleksi PPPK guru sesuai kualifikasi minimum guru tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 41 dan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen pasal 8. Kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa kualifikasi guru wajib memiliki kualifikasi akademik (S1) dan sertifikat pendidik.

Dalam hal ini, guru honorer yang sudah bersertifikat pendidik dan menjunjung tinggi profesionalisme guru sebagai suatu profesi yang mulia dan kami semua sudah disumpah profesi guru, sudah sah dan legal secara Undang undang, tetapi masih harus diuji kembali dalam seleksi PPPK 2021. Menurut mas menteri itu adil, tapi tidak adil bagi kami yang sudah melewati berbagai proses program sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kemendikbud seolah-olah tidak memperhatikan keberadaan kami, yang sudah selayaknya mendapatkan prioritas seleksi PPPK 2021.

Pelaksanaan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 memberikan keistimewaan bagi guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, yaitu dengan memberikan nilai maksimum pada seleksi kompetensi bidang (SKB) dibuktikan adanya sertifikat pendidik yang linear dengan jurusan formasi cpnsnya. Sudah seharusnya juga hal ini diterapkan kepada seleksi PPPK tahun 2021. Bukankah PPPK dan PNS sama-sama sebagai ASN? Mengapa tidak mencantumkan keistimewaan bagi guru honorer negeri yang sudah mempunyai sertifikat pendidik.

Pemerintah perlu memperjelas status kepegawaian sekolah swasta yang menjadi peserta seleksi PPPK 2021, jangan disamakan semua status non ASN sebagai Guru Honor. Seharusnya GTY status kepegawaiannya setara dengan ASN Sekolah negeri dan tidak boleh mendaftar PPPK, karena jenjang karir GTY jelas bisa memperoleh TPG dan Inpassing. Seharusnya PPPK selesaikan dahulu Guru Honor di sekolah negeri untuk tahun 2021, sehingga sertifikat pendidik tidak akan menjadi polemik saat dijadikan nilai tambah saat tes.

Tuntaskan dulu masalah guru Honor di sekolah negeri. Setelah tuntas, barulah kekurangan guru ASN bisa ditutupi dengan membuka pendaftaran untuk guru swasta dan alumni PPG pra jabatan yang tidak mengajar.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 dan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020, tercantum bahwa ada kekhususan tersendiri jika formasi PPPK mensyaratkan sertifikasi Profesi sudah dianggap mencapai PG. Maka dari itu kemendikbud harus tegas dan patuh menjalankan UU guru dan dosen, kemudian ada istilah wajib bagi guru mempunyai sertifikat pendidik, berarti dalam hal ini kemendikbud mensyaratkan sertifikasi profesi dalam seleksi PPPK.

Jika tidak disyaratkan khusus, akan minumbulkan kecemasan yang terjadi bilamana guru honor negeri dan bersertifikasi profesi ada yang tidak mencapai Passing Grade (PG) harus siap dipindahtugaskan dari sekolah asal bahkan sampai harus siap ditugaskan menjadi tenaga pendidikan sesuai bahan diskusi Kemendikbud dengan Pemerintah daerah mengenai seleksi Guru PPPK tahun 2021.

5.3 Kendala dalam Implementasi Kebijakan PPPK di Jawa Tengah

1) Rekrutmen/seleksi Guru PPPK

Proses seleksi/rekrutmen menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PPPK di Jawa Tengah. Kendala tersebut antara lain terkait tidak adanya beberapa formasi bagi guru yang sudah lama mengajar/mengabdikan di sekolah. Hal ini menjadi kekhawatiran sebagian besar guru honorer di Jawa Tengah, karena afirmasi ditekankan pada usia guru honorer, bukan pada lamanya guru honorer mengabdikan. Selain itu, sebagaimana diberitakan jateng.tribunnews.com, proses rekrutmen guru PPPK di Jawa Tengah secara teknis juga mengalami kendala, seperti terkait keterlambatan pemberitahuan lokasi tes, sehingga banyak peserta tes PPPK yang tidak mendapatkan pemberitahuan lokasi tesnya dimana. Kendala lain yang dihadapi dalam rekrutmen guru PPPK di Jawa Tengah yaitu banyaknya peserta yang lanjut usia. Berbeda dengan guru honorer usia muda, guru honorer lansia secara teori banyak yang lupa sehingga sebagian besar mengalami kegagalan saat

mengikuti tes PPPK, padahal guru tersebut sudah lama mengabdikan sebagai guru honorer di sekolah.

Permasalahan formasi juga menjadi kendala dalam implementasi Guru PPPK. Rekrutmen yang dijanjikan pemerintah sebanyak 1 juta peserta, namun dalam kenyataannya formasi yang dikeluarkan hanya 513 ribu guru sehingga masih banyak guru honorer yang belum memiliki kesempatan untuk menjadi Guru PPPK. Hal ini tentunya akan menjadi permasalahan baru yang juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi, sebagian besar guru honorer tersisa adalah guru honorer yang sudah lanjut usia.

Kendala lain yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan Guru PPPK adalah terkait adanya penolakan guru kategori K2 yang menolak rekrutmen guru PPPK. Sebagian besar guru K2 menganggap bahwa kebijakan rekrutmen Guru PPPK tidak sesuai amanat PP 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Guru Honorer Menjadi CPNS. Sesuai ketentuan tersebut, Guru kategori K2 tetap menuntut diangkat menjadi PNS. Selain itu, kebijakan rekrutmen guru PPPK dianggap merugikan guru K2 karena masa kerja tidak dihitung, sehingga guru K2 meskipun sudah puluhan tahun mengabdikan disamakan dengan guru honorer lain yang baru mengabdikan. Sistem kerja kontrak juga menjadi permasalahan karena dikhawatirkan suatu saat bisa diputus perjanjian kerjanya.

2) Data Calon Guru PPPK

Selain permasalahan rekrutmen, kendala dalam implementasi kebijakan PPPK adalah terkait data calon guru PPPK. Terdapat guru honorer yang tidak terdaftar/muncul pada data dapodik sehingga guru tersebut tidak dapat mengikuti tes guru PPPK. Selain itu ditemukan data bahwa terdapat guru honorer yang sudah berhenti menjadi guru namun masih tercatat di data Dapodik.

3) Gaji Guru PPPK

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, gaji Guru PPPK sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun demikian yang masih menjadi rancu terkait gaji guru PPPK adalah

mengenai tunjangan kinerja (TUKIN atau TPP) pada setiap daerah berbeda-beda. Bahkan, terdapat guru PPPK yang tidak dapat karena belum ada kejelasan Tukin untuk Guru PPPK.

4) Penyampaian Informasi Kurang Optimal

Penyampaian informasi dari Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas) dirasa kurang optimal, sehingga memunculkan kecemasan di antara para guru. Para guru sebenarnya sudah merasa cemas sejak beberapa hari sebelum tes dimulai, sebab kurang optimalnya informasi yang diberikan Panselnas secara online.

Beberapa masalah yang terjadi di lapangan seperti perubahan jadwal, lokasi tes yang tidak muncul, laman website SSCASN dan gurupppk.kemdikbud.go.id yang sempat tidak bisa diakses, dan kepastian kebijakan afirmasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

5) Kebutuhan Formasi Tidak Sesuai Kondisi Lapangan

Data yang menjadi prioritas utama bukanlah mata pelajaran, melainkan sekolah. Pada beberapa kasus, seperti formasi yang disediakan untuk mata pelajaran tidak berdasarkan kebutuhan di lapangan. P2G menilai kebutuhan formasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dapat merusak ekosistem sekolah dan guru.

Data kebutuhan tidak berbasis kondisi lapangan. Ada fakta misalnya, guru sejarah PNS cuma satu dan tahun depan pensiun. Formasi yg dibuka adalah mapel geografi, yang mana jumlah kebutuhan yang sebenarnya hanya 1 tapi tertulis 2. Guru honorer yang ada, sudah satu.

Kalau semisal ingin masuk ikut ujian, maka harus ikut geografi. Artinya si guru harus mengorbankan kompetensi keahlian, bidang studi, dan sertifikasinya. Ini jelas menyalahi UU Guru dan Dosen tentang kompetensi dan profesionalitas guru. Akan mengacaukan kompetensi guru. Dan memaksa guru nantinya untuk kuliah lagi dan sertifikasi ulang, bisa saja terjadi. Rasanya akan merusak ekosistem sekolah dan guru.

6) Kebijakan Afirmasi Dinilai Tidak Adil

Banyak pihak meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk memberikan afirmasi berdasarkan lama mengabdikan dan usia. Namun, Kemendikbudristek hanya memberikan afirmasi 15% bagi guru berusia di atas 35 tahun dan mengabdikan minimal 3 tahun. Pihaknya menilai kebijakan tersebut tidak adil.

Mestinya afirmasi diberikan berdasarkan range lama mengabdikan. Simulasinya misal, 3-5 tahun 15%; 6-10 tahun 20%; 11-15 tahun 25%; 16-20 tahun 30%, 21-25 tahun 35%, dst. Mengingat UU ASN NO. 5 Tahun 2014 memerintahkan agar manajemen ASN termasuk PPPK diselenggarakan berdasarkan asas proporsionalitas, akuntabilitas, nondiskriminatif, keadilan, dan kesetaraan.

7) Soal Tes Seleksi Kompetensi Dirasa Sulit

Peserta merasa soal yang diujikan dalam Seleksi Kompetensi, khususnya Kompetensi Teknis sulit. Hal tersebut dirasakan oleh mayoritas peserta tes. Mereka melaporkan soalnya jauh dari apa yang mereka pelajari dalam Bimtek/Bimbingan Belajar latihan soal yang diberikan Kemendikbud.

Ambang batas atau passing grade yang ditentukan dianggap terlalu tinggi. Passing grade PPPK untuk Kompetensi Teknis, mengharuskan peserta memenuhi skor minimal sampai 65 persen.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Dinamika politik kebijakan perekrutan PPPK menunjukkan bahwa profesi guru tidak bisa terlepas dari intervensi politik praktis. Banyaknya jumlah guru secara nasional menjadi posisi yang strategis, sehingga kekuasaan perlu mengambil peran dalam setiap dinamika kebijakan yang menyangkut guru. Dinamika ini tidak menjadi masalah selama guru tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Masyarakat perlu mengawal agar guru tidak lagi menjadi alat politik seperti pada masa Orde Baru. Guru sebagai ASN harus netral dan secara tegas perlu didudukkan pada jalurnya, guru professional yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan kompetensinya.

Jaminan hukum, sosial, dan ekonomi PPPK memang sudah termuat dalam serangkaian undang-undang. Namun regulasi tersebut masih memiliki celah hukum. Ditinjau dari perspektif HAM, regulasi tersebut belum menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, saling bergantung dan terkait, serta tanggung jawab negara. Negara perlu meninjau kembali dan selanjutnya memperbaiki regulasi tentang PPPK, agar lebih menjunjung tinggi hak-hak PPPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrani, N.S., 2015. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Civil Service Journal*, 9(2 November).
<https://gurupppk.kemdikbud.go.id/webpppk/>
<https://bkd.jatengprov.go.id/article/view/862#>
<https://nasional.tempo.co/read/1510179/pgri-minta-revisi-aturan-penerimaan-pppk-guru>
<https://www.bkn.go.id/berita/aturan-pppk-rilis-tidak-ada-lagi-rekrutmen-tenaga-honorer-dalam-bentuk-apapun>
- Juliani, H., 2019. Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), pp.314-325.
- ISTIQLALLIA, N.F., 2018. *KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Khairunnisa, R., Hikmah, N. and Ada'Komman, J., 2019. Evaluation of Teacher Performance in Teaching and Learning Process. In *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019*. European Alliance for Innovation (EAI).
- Malwa, R.U., 2019. Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)(Studi Kasus: Pasal 22 tentang Hak PPPK) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(2).
- Mahaputra, A.B., Wairocana, I.G.N. and Satyawati, N.G.A.D., 2015. Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Jurnal*.
- Ngabiyanto, D. D. Kameo, P. G. Wiloso, and B. Ismanto. 2019. "The Dynamics of Public Policy for Non-Permanent Teachers in Semarang, Indonesia," *Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 233–254, 2019, doi: 10.15294/ipsr.v4i2.17213.
- Ngabiyanto. 2018. Politik Guru Honorer (Sebuah Kajian tentang Kebijakan Terhadap Guru Honorer di Kota Semarang), *Forum Ilmu Sosial*, vol. 45, no. 2. pp. 143–151, 2018, doi: 10.15294/fis.v45i2.17090.
- Ngabiyanto. 2019. Guru Honorer Antara Pengabdian, Tuntutan Ekonomi, dan Kebijakan Publik. *Disertasi*.
- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/Hk.01.03/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Pangestuti, T.T.A., Wulandari, R., Miftahul Jannah, E. Setiawan, F., 2021. Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru Pns Menjadi Pppk. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(4), pp.1133-1138.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP).

- Qomarani, L.N., 2020. Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Cakrawala Kepegawaian Di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), pp.95-110.
- Qomarani, L.N., 2020. THE ANOMALY OF THE PRESENCE OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH THE EMPLOYMENT AGREEMENT (PPPK) IN THE EMPLOYMENT HORIZON IN INDONESIA. *Cepalo*, 4(2), pp.83-94.
- Remaja, I Nyoman Gede; Sudarsono; Budiono, Abdul Rachmad; and Safaat, Muchamad Ali. 2016. The Contruction of Legal Protection Arrangement on Governmental Employees with Work Contract in Indonesian Governance Reforms Staffing. *Journal of Law, Policy and Globalization*. Vol. 52, 2016.
- Rohida, L., 2015. ANALISIS KOMPARASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM PARADIGMA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. *Civil Service Journal*, 9(2 November).
- Tobroni, F., 2020. Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum. *Jurnal HAM*, 11(2), pp.219-238.
- Wulandari, I.A.P., Ibrahim, R. and Suardita, I.K., 2019. kedudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian (pppk) kerja berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), pp.1-15.
- Yurikosari, Andari. 2016. Ambivalensi Status Dan Kedudukan Pppk Berdasarkan Uu-Asn Dan Uu Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Vol 10 No 2 November (2016).

Political Dynamics of Government Employees with the Employment Agreement Policies (A Study of Digital Ethnography on Online News Sites)

Ngabiyanto¹, Isnarto², Asep Purwo Yudi Utomo³, Didi Pramono⁴,
Iwan Hardi Saputro⁵

^{1,5}Department of Politics and Citizenship, Universitas Negeri Semarang

²Department of Mathematics, Universitas Negeri Semarang

³Department of Indonesian Language and Literature, Universitas Negeri Semarang

⁴Department of Sociology and Anthropology, Universitas Negeri Semarang

*ngabiyanto@mail.unnes.ac.id

Abstract. The aim of this study is to examine the political dynamics of government policies in the teacher recruitment of government employees with the employment agreement (PPPK). The recruitment of PPPK teachers is an affirmative government policy on the aspirations of honorary teachers in struggling for their status and welfare. The method used in this study is digital ethnography on online news sites to get an overview of the political dynamics of government policies until finally officially recruiting PPK teachers. The results of the study indicate that the dynamics of the PPPK teacher recruitment policy could not be separated from practical politics. The government at least need six years to decide in conducting the PPPK recruitment in 2021 nationally. How long of the formulation of this regulation does not mean that it will provide strong legal guarantees for PPPK in the future. The regulation is considered to violate human rights, because it is not in line with the equality and non-discrimination principle. The implication of this study is that the community needs to take part in controlling so that teachers are not move backwards into the realm of practical politics, and encourage steps to revise the regulations on PPPK in order to appreciate the rights PPPK well.

1. Introduction

In 2021, the government conducted the selection of State Civil Apparatus (ASN) admissions again which were divided into two categories, namely Civil Servants (PNS) and Government Employees with the Employment Agreement (PPPK). This acceptance

process certainly received various responses from the community. There are some people who responded positively, because the opening of the selection for PPPK acceptance could be an opportunity for honorary teachers to improve their status and welfare. In addition, this PPPK policy also provided opportunities for teachers over 35 years old to become ASN. The community also responded negatively to this PPPK policy, because the spreading information stated that all teacher ASN formations were opened through the PPPK mechanism. This policy certainly thwarted the dream of bachelor of education who wanted to become civil servants.

The discourse on recruitment of Government Employees with the Employment Agreement has actually been announced for a long time. Even before 2021, several agencies have recruited employees by using the PPPK mechanism. The legal uncertainty has prevented PPPK enrollment from being implemented simultaneously at the national level. The need for teachers increase. On the other hand, the recruitment of ASN was not as many as the need of teachers in the reality. Teachers who retired also increase every year. This condition encouraged schools to recruit honorary teachers independently. The ratio of teachers and students needed to be balanced in each school so that the learning process will be better [1] [2] [3].

The legal regulations that never appear, supported the number of honorary teachers increase every year. The data shows that the provincial honorary teachers are 13,328 people, district/city honorary teachers are 141,724 people, and school honorary teachers are 704,503 people [4]. The nepotism practice also contributed to the number of honorary teachers in each school. Children, relatives, and other kinship relationships with the school were the basis for recruiting someone to become an honorary teacher. "Devotion" became an excuse for honorary teachers to work in schools, with the hope that one day they can be appointed as ASN.

By learning from other countries (case studies in America and England), teacher recruitment is carried out systematically, continuously, and comprehensively. Recruitment doesn't only about how to receive and hire teachers. The teacher recruitment stage begins with the recruitment, pre-service, induction, and initial professional development stages. The indicators that form the basis of recruitment are the identification of personal characteristics, the characteristics of the prospective teacher (millennials or generation z), representing the population between teachers, having a gender perspective, and the concept and content of teacher recruitment promotions [5] [6] [7].

A new problem arose related to how the mechanism for paying honorary teachers. So far, what had developed at the school level was that honorary teachers were paid through the School Operational Assistance (BOS) fund. The amount of salary received by honorary teachers ranged from IDR 100,000 to IDR 300,000 per month. This salary was certainly far from the minimum number to meet the necessities of life for one month [8]. BPS data states that the average per capita expenditure for living for one month in Jakarta is IDR 4,446,770,- [9].

The second problem as a result of the existence of honorary teacher status was employment status. The uncertainty about the employment status of honorary teachers made the career paths was unclear. This consequence is logical because honorary teachers are not an official policy issued by the government. The existence of honorary teachers is more a local policy at the principal level to answer the needs of teachers in schools [8] [10].

The government in 2021 seemed to have been steady in recruiting teachers through the PPPK mechanism. The legal basis for the recruitment of PPPK included Law no. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus [11]; PP No. 49 of 2018 concerning

Management of Government Employees with the Employment Agreement [12]; Presidential Decree No. 38 of 2020 concerning Types of Positions that can be filled by PPPK [13]; Presidential Decree No. 98 of 2020 concerning Salaries and Allowances of PPPK [14]; and BKN Regulation No. 1 of 2019 concerning the Technical Guidelines for Procurement of PPPK [15].

The legal basis above was formulated from 2014 to 2020. It was a long process for recruitment policy of Government Employee recruitment with the Employment Agreement (PPPK). The political dynamics of this policy are certainly interesting to be studied more deeply through this paper. It should be noted that in Indonesia education is still inseparable from politics field [16] [17].

The next problem is about how the legal, social, and economic guarantees for teachers with PPPK status are. However, teaching is a profession that requires stability in life so that teachers focus on their main tasks and functions as well as developing their competencies. How teachers will be able to educate the nation's life if at the same time they have to think about their life that are less prosperous.

This study becomes urgent considering that in 2021 the government recruit teachers nationally through the PPPK mechanism. This article needs to contribute in formulating a comprehensive legal guarantee model for the existence, status, and welfare of PPKK teachers in the future.

2. Methodology

This study was conducted by using the digital ethnography method. Digital ethnography is an approach to conduct ethnography in the contemporary field, or conducting a study in the digital field, a very dynamic and rapidly developing world. Digital ethnography explores the consequences of the digital media presence in real life [18]. This digital ethnographic method is used to examine the political dynamics of Government Employees with the Employment Agreement (PPPK) policies through the data contained on online news sites. This digital data is also used to formulate a model of legal, social, and economic guarantees for teachers with PPPK status.

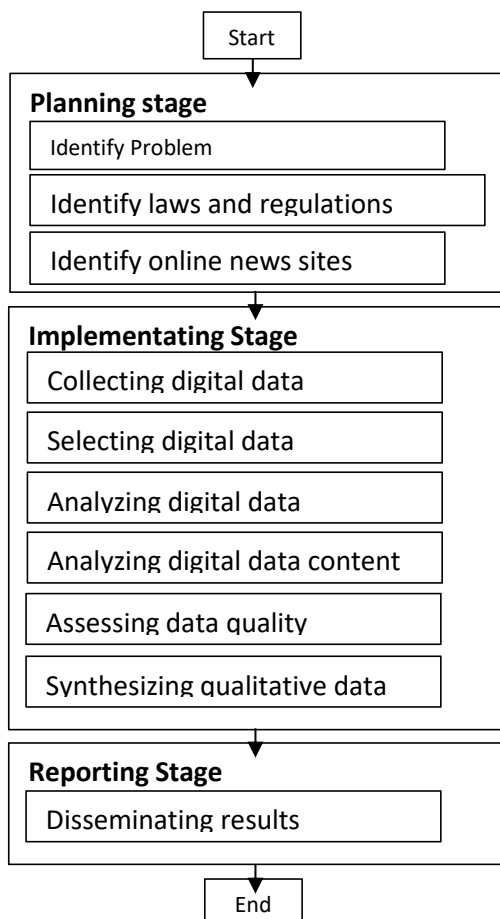


Table 1. Research Design

Problem focus	Dynamics of government policy in determining Government Employees with the Employment Agreement (PPPK) Online News Site
Research settings	government policy
Object of research	Government
Research subject	Digital ethnography
Technique of collecting the data	Triangulation of data through research data
Test data validity	

		sources
Data analysis technique		Qualitative

Table 2. Research Question (RQ)		
ID	Research Question	Motivation
RQ1	What is the legal basis for PPPK recruitment?	Identifying the legal basis for PPPK recruitment
RQ2	What is the political dynamics of the PPPK policy?	Reviewing the political dynamics of PPPK policies
RQ3	How is the security of PPPK legal, social and economic guarantees?	Analyzing current PPPK legal, social and economic guarantees

Figure 1. Research Stages

3. Results and Discussion

The political dynamics of the PPPK recruitment policy began when the discourse of bureaucratic reform was announced by the government, this was manifested in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This law explicitly in article 6 states that there are two categories of ASN, namely civil servants with permanent employee status and PPPK with employee status with employment agreement. Both have the same position, function, duty, role and obligation. The division of these two categories of ASN is a reduction from the number of types of civil servants based on previous laws. These changes can be seen in the table below.

Table 3. The Development of Types of Civil Servants

Law No. 8 of 1974	Law No. 43 of 1999	Law No. 5 of 2014
Civil Servants consist of:	Civil Servants consist of:	ASN consists of:
1. Civil Servant	1. Civil Servant	1. Civil Servant
2. Members of the Armed Forces of the Republic of Indonesia	2. Members of the Indonesian National Army	2. Government Employees with the Employment Agreement
	3. Member of the Indonesian National Police	
Civil servants consist of:	Civil servants consist of:	
1. Central Civil Servant	1. Regional Civil Servants	
2. Regional Civil Servants	2. Central Civil Servant	
3. Other civil servants	3. Non-Permanent	

determined by
Government Regulation
(PP)

Employees

Source: Law no. 8 of 1974, Law no. 43 of 1999, and Law no. 5 of 2014

There are some significant differences from the three laws above. UU no. 8 of 1974 has not included a rule that civil servants must give big appreciation the neutrality of the political parties influence. The absence of this clause made civil servants active in political activities during the New Order era, even being directed to support one political party, namely the Golkar Party through the Indonesian Civil Servant Corps (KORPRI) [19]. Misappropriation of the meaning of Article 3 of Law no. 8 of 1974 concerning made civil servants have a strategic role in perpetuating the power of the New Order for 32 years [20]. ABRI even carried out a dual function, namely military and socio-political functions [21].

This problem was then corrected through Law no. 43 of 1999. Article 3 paragraphs 2 and 3 explain that civil servants must be neutral from the influence of all political groups or parties, therefore civil servants are prohibited from becoming members and/or administrators of political parties. This prohibition is emphasized in Government Regulation Number 37 of 2004 concerning the Prohibition of Civil Servants from becoming Members of Political Parties. This regulation is also the mandate of the reform agenda to abolish the dual function of the Armed Forces and reform the professional and accountable civil servant bureaucracy [20].

The agenda for bureaucratic reform was further strengthened by the amendment of Law no. 43 of 1999 into Law no. 5 of 2014 [22]. This new law further simplifies the types of State Civil Apparatus into only two categories, namely PNS and PPPK. In addition, through this law, the ASN Commission (KASN) has been established, one of the duties is to maintain the neutrality of ASN employees. Although this legal basis was promulgated in 2014, however, there is no government policy to conduct PPPK recruitment nationally. The uncertainty for the determination of policies occurs in line with political dynamics at the national level. By observing this dynamic, it is reasonable that in 2021 a national PPPK recruitment will be opened.

This uncertainty for PPPK recruitment was caused by the inconsistency between central and local government policies. The local government did not want the PPPK salary to be charged to the APBD [23], [24], [25]. Presidential Decree No. 98 of 2020 article 5 paragraphs 1 and 2 explains that for PPPKs who work in central agencies, salaries and allowances are charged to the state budget. The salaries and allowances of PPPKs who work in regional agencies are charged to the APBD. It should be understood, currently the APBD is also focused on handling the COVID-19 pandemic.

The COVID-19 pandemic situation was also a factor the uncertainty of PPPK recruitment. The initial reports stated that the selection for CPNS and PPPK would be opened on May 31, 2021 [26] [27], but it was canceled and has not been opened yet [28] [29]. Other news reports that according to the Head of BKN, there are several regulations for the procurement of CPNS, non-teacher PPPK, and teacher PPPK this year that the government has not yet determined. Another reason is that there are still proposals for revision from several agencies [30] [31].

The Security of PPPK Legal, Social and Economic

The legal basis for PPPK teachers is stated in Law no. 5 of 2014 and PP No. 49 of 2018 is considered to provide treatment that is not in accordance with human rights principles. The principles that have not been contained in the regulation include the

principle of equality, interdependence and interdependence, and state responsibility [32]. The state seems irresponsible in protecting the interests of the PPPK, this is reflected in the status, work continuity, obligations, and rights of ASN.

The similarity between civil servants and PPPK lies in their obligations and the opportunities for positions that can be filled by ASN. The difference between PNS and PPPK lies in the rights and continuity of work as a result of the difference in status. In this case, the state does not carry out positive obligations. The social implication is that there is an imbalance in the relationship between PNS and PPPK. The status of the PPPK, which is prone to job loss, makes it subordinated, and there may be discriminatory treatment. Teachers with PPPK status are prone to double burden because of their unsafe position so they cannot refuse. The contract system for PPPK also does not guarantee that PPPK teachers can achieve high positions as stated in the law. From a human rights perspective, this is clearly not in line with the equality and nondiscrimination principle [33] [34].

In terms of economic guarantees based on Presidential Decree no. 98 of 2020, PPPK salaries and allowances charged to the APBD are also still very prone to problems. Problems that may arise include differences in the amount of PPPK salaries and allowances between regions, PPPK salaries and allowances that are not the same as civil servants, delays in giving PPPK salaries and allowances, and so on. The state should guarantee justice, protection, welfare, and responsibility for its employees, both civil servants and PPPK.

4. Conclusion

The political dynamics of PPPK recruitment policies show that the teaching profession cannot be separated from practical political intervention. The large number of teachers nationally has become a strategic position, so that power needs to play a role in any policy dynamics concerning teachers. This dynamic is not a problem as long as the teacher is not the most disadvantaged party. The community needs to ensure that teachers are no longer a political tool like during the New Order era. Teachers as ASN must be neutral and firmly need to be put on track, professional teachers who focus on learning and developing their competencies.

The security of PPPK legal, social and economic guarantees are already contained in a series of laws. However, the regulation are still vulnerable. From a human rights perspective, these regulations do put forward the principles of equality, justice, interdependence, as well as state responsibility. The state needs to review and further improve regulations on PPPK, in order to put forward the rights of PPPK.

References

- [1] R. J. Rodriguez and B. Elbaum, "The role of student-teacher ratio in parents perceptions of schools engagement efforts," *J. Educ. Res.*, vol. 107, no. 1, pp. 69–80, 2014, doi: 10.1080/00220671.2012.753856.
- [2] C. R. Cook *et al.*, "Evaluating the Impact of Increasing General Education Teachers' Ratio of Positive-to-Negative Interactions on Students' Classroom Behavior," *J. Posit. Behav. Interv.*, vol. 19, no. 2, pp. 67–77, 2017, doi: 10.1177/1098300716679137.
- [3] P. R. Pierce, "Effects of Teacher-Student Ratio in Response to Intervention Approaches," *Rev. Educ. Res.*, vol. 4, no. 4, p. 382, 1934, doi: 10.2307/1167806.
- [4] Kemdikbud, "Guru Menurut Status Kepegawaian," *referensi.data.kemdikbud.go.id*, 2020. https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgtk/ptk_dash2.php?id=20.

- [5] J. A. Luft, S. S. Wong, and S. Semken, "Rethinking Recruitment: The Comprehensive and Strategic Recruitment of Secondary Science Teachers," *J. Sci. Teacher Educ.*, vol. 22, no. 5, pp. 459–474, 2011, doi: 10.1007/s10972-011-9243-2.
- [6] S. Bulger, E. M. Jones, A. R. Taliaferro, and V. Wayda, "If You Build It, They Will Come (or Not): Going the Distance in Teacher Candidate Recruitment," *Quest*, vol. 67, no. 1, pp. 73–92, 2015, doi: 10.1080/00336297.2014.984731.
- [7] G. Stidder, "The Recruitment of Secondary School Physical Education Teachers in England: A Gendered Perspective?," *Eur. Phys. Educ. Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 249–269, 2002, doi: 10.1177/1356336X020083005.
- [8] N. Ngabiyanto, D. D. Kameo, P. G. Wiloso, and B. Ismanto, "The Dynamics of Public Policy for Non-Permanent Teachers in Semarang, Indonesia," *Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 233–254, 2019, doi: 10.15294/ipsr.v4i2.17213.
- [9] BPS, "Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 Household Expenditure Survey," *bps.go.id*, 2018.
- [10] P. G. W. Ngabiyanto, Daniel D. Kameo, Bambang Ismanto, "The Indonesian Teachers' Dilemmas From Colonial To Reformasi Era: Non-Permanent Teachers' Welfare and Status Issues," *Paramita Hist. Stud. J.*, vol. 29, no. 1, pp. 102–118, 2019, doi: 10.15294/paramita.v29i1.18613.
- [11] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," pp. 1–104, 2014.
- [12] P. 2018, "Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK," pp. 1–64, 2018.
- [13] A. Sipil, P. Pemerintah, T. Lembaran, and P. Pemerintah, "Perpres No. 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi PPPK," no. 023599, pp. 23599–23606, 2018.
- [14] Perpres No. 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
- [15] BKN, "Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK," 2019, [Online].
- [16] M. Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- [17] Ngabiyanto, "Politik Guru Honorer (Sebuah Kajian tentang Kebijakan Terhadap Guru Honorer di Kota Semarang)," *Forum Ilmu Sosial*, vol. 45, no. 2. pp. 143–151, 2018, doi: 10.15294/fis.v45i2.17090.
- [18] A. Castriotta, *Sarah Pink, Heather Horst, John Postill, Larissa Hjorth, Tania Lewis, Jo Tacchi, 2016, Digital Ethnography: Principles and Practice*, vol. 4, no. 1 NS. 2017.
- [19] S. Marpaung, "Pengaturan Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil di Masa Orde Baru dan Reformasi," *J. Huk. Prodi Ilmu Huk. Fak. Huk. Untan (Jurnal Mhs. S1 Fak. Hukum) Univ. Tanjungpura*, no. Vol 4, No 1 (2015): Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Untan, 2015.
- [20] K. P. Birokrat, "Birokrasi dan kekuasaan politik," 2009.
- [21] P. Carey, "The Indonesian Army and the State: Problems of Dwi fungsi in Early Nineteenth-Century Perspective," *Indones. Circle. Sch. Orient. African Stud. Newsl.*, vol. 9, no. 26, pp. 51–58, 1981, doi: 10.1080/03062848108723844.
- [22] DPR-RI, "UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," 2014.
- [23] *indonesiapos.co.id*, "Rekutmen CPNS dan PPPK Tarik Ulur, Imam Tahir Ingatkan Bupati Agar Ditunda," 2021. <https://indonesiapos.co.id/rekutmen-cpns-dan-pppk-tarik-ulur-imam-tahir-ingatkan-bupati-agar-ditunda/> (accessed Jun. 22, 2021).

- [24] Fikri, "Pusat dan Daerah Tarik Ulur, Honorer: Kalau Seperti Ini Kami Bingung," *kabarpolitik.com*, 2020. <https://kabarpolitik.com/pusat-dan-daerah-tarik-ulur-honorer-kalau-seperti-ini-kami-bingung/>.
- [25] A. Mirsan, "Pusat dan Daerah Tarik Ulur, Honorer: Kalau Seperti Ini Kami Bingung," *fajar.co.id*, 2020. <https://fajar.co.id/2020/11/15/pusat-dan-daerah-tarik-ulur-honorer-kalau-seperti-ini-kami-bingung/>.
- [26] M. R. B. Kencana, "Seleksi CPNS 2021 Dibuka Akhir Mei, Cek Kesiapan Formasinya," *Liputan6*, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4563266/seleksi-cpns-2021-dibuka-akhir-mei-cek-kesiapan-formasinya>.
- [27] M. Arnani, "Simak! Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Dibuka Akhir Mei, Ini Info Lengkapnya," *kompas.com*, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/124500465/simak-pendaftaran-cpns-dan-pppk-2021-dibuka-akhir-mei-ini-info-lengkapnya?page=all>.
- [28] F. R. Ananda, "Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Batal Diadakan 31 Mei 2021, Ini Kata BKN," *okezone.com*, 2021. <https://economy.okezone.com/read/2021/06/01/320/2418573/pendaftaran-cpns-dan-pppk-2021-batal-diadakan-31-mei-2021-ini-kata-bkn>.
- [29] Fey/ain, "Pendaftaran CPNS 2021 Batal Dibuka Hari Ini," *cnnindonesia.com*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531074906-20-648573/pendaftaran-cpns-2021-batal-dibuka-hari-ini>.
- [30] Kristina, "Pendaftaran Seleksi PPPK Guru Batal Dibuka, Lihat Lagi Kisaran Gajinya," *detik.com*, 2021. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-5588032/pendaftaran-seleksi-pppk-guru-batal-dibuka-lihat-lagi-kisaran-gajinya>.
- [31] P. Baskhara, "Apa Penyebab Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Batal Dibuka Hari Ini? Berikut Ini Penjelasan Lengkapnya," *tribunnews.com*, 2021. <https://wartakota.tribunnews.com/2021/05/31/apa-penyebab-pendaftaran-cpns-dan-pppk-2021-batal-dibuka-hari-ini-berikut-ini-penjelasan-lengkapnya>.
- [32] F. Rahmawati, "Mengapa Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Batal Dibuka Hari Ini?," *kompas.tv*, 2021. <https://www.kompas.tv/article/179072/mengapa-pendaftaran-cpns-dan-pppk-2021-batal-dibuka-hari-ini>.
- [33] F. Tobroni, "Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum (Human Rights Review in Regulations on PPPK with Intertextuality Legal Text)," *J. HAM*, vol. 11, no. 2, pp. 4–8, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.219-238>.
- [34] I. E. J. Dwi Aryanti Ramadhani, "Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Institusi Perguruan Tinggi," *J. Yuridis*, vol. 7, no. 1, pp. 1–26, 2020.

Lampiran 2 Hak Cipta


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202136693, 3 Agustus 2021
Pencipta	
Nama	: Dr. Ngabiyanto, M.Si., Dr. Ismarto, M.Si. dkk
Alamat	: Trangkil RT 005/RW 010 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati, Semarang, JAWA TENGAH, 50221
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dr. Ngabiyanto, M.Si., Dr. Ismarto, M.Si. dkk
Alamat	: Trangkil RT 005/RW 010 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati, Semarang, JAWA TENGAH, 50221
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis (Artikel)
Judul Ciptaan	: Political Dynamics Of Government Employees With The Employment Agreement Policies (A Study Of Digital Ethnography On Online News Sites)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 3 Agustus 2021, di Semarang
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000263024

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

n.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994051001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ngabiyanto, M.Si.	Trangkil RT 005/RW 010 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati
2	Dr. Isnarto, M.Si.	Jl. Dewi Sartika Barat No. 53 RT 003/RW 003 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati
3	Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.	Karangtengah RT 007/RW 003 Desa Karangtengah Kecamatan Banjarnegara
4	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd.	Dukuhwaluh RT 003/RW 005 Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran
5	Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Si.	Perumahan Anugerah RT 004/RW 003 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ngabiyanto, M.Si.	Trangkil RT 005/RW 010 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati
2	Dr. Isnarto, M.Si.	Jl. Dewi Sartika Barat No. 53 RT 003/RW 003 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati
3	Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.	Karangtengah RT 007/RW 003 Desa Karangtengah Kecamatan Banjarnegara
4	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd.	Dukuhwaluh RT 003/RW 005 Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran
5	Iwan Hardi Saputro, S.Pd., M.Si.	Perumahan Anugerah RT 004/RW 003 Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunungpati



Lampiran 3 Biodata Ketua dan Anggota

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Drs. Ngabiyanto, M.Si.				
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki				
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala				
4.	NIP	196501031990021001				
5.	NIDN	0003016509				
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blora, 3 Januari 1965				
7.	Alamat Rumah	Jl. Setia Rukun 36 Perum Trangkilejahtera, RT 05 RW 10 Sukorejo Gunungpati, Semarang				
8.	Nomor Telepon/Faks	081325734563				
9.	Alamat Email	mass_abi@yahoo.com				
10.	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 1600 orang, S2= - orang, S3= - orang				
11.	Mata Kulian yang Diampu	<table border="1"> <tr> <td>1. Pengantar Ilmu Politik</td> </tr> <tr> <td>2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah</td> </tr> <tr> <td>3. Media dan Sumber Pembelajaran PPKn</td> </tr> <tr> <td>4. dsb.</td> </tr> </table>	1. Pengantar Ilmu Politik	2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah	3. Media dan Sumber Pembelajaran PPKn	4. dsb.
1. Pengantar Ilmu Politik						
2. Penulisan Karya Tulis Ilmiah						
3. Media dan Sumber Pembelajaran PPKn						
4. dsb.						

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Semarang	UGM	UKSW
Bidang Ilmu	PMP-KN	Ketahanan Nasional	Kebijakan Publik
Tahun Masuk-Lulus	1989-1993	1999-2001	-2019
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi			Guru Honoror: Antara Pengabdian, Tuntutan Ekonomi, dan Kebijakan Publik
Nama Pembimbing/Promotor			<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Daniel D. Kameo, S.E., M.A., Ph.D. 2. Dr. Pamerdi Giri Wiloso, M.Si. 3. Dr. Bambang Ismanto, M.Si.

C. Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2011	Participating Interest Pemerintah Kabupaten Blora dalam Pengelolaan Blok Cepu di Era Otonomi Daerah	DIPA	7.000.000,00
2	2011	Model Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pada Era Otonomi Daerah di Kabupaten Blora	DIPA	16.000.000,00
3	2012	Evaluasi Model Pembinaan Kinerja Dosen Pasca Sertifikasi di Kota Semarang Tahun 2012	DIPA PNBP	16.000.000,00
4	2013	Kajian Dampak Sosial Pengelolaan Migas (Studi kasus: Tambang Minyak Blok Cepu di Kabupaten Blora	DIPA UNNES	10.000.000
5	2014	Model Pengembangan Kurikulum Prodi Ilmu Politik Berbasis Etika Politik dan Penguatan Institusi Lokal di Universitas Negeri Semarang	DIPA FIS UNNES	7.000.000,00
6	2014	evaluasi kesiapan sekolah jenjang pendidikan dasar di Jawa Tengah dalam melaksanakan pendidikan karakter bangsa berdasarkan kurikulum tahun 2013	DIPA UNNES	30.000.000,00
7	2015	Evaluasi Kesiapan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Jawa Tengah dalam Melaksanakan Pendidikan Karakter Bangsa Berdasarkan Kurikulum Tahun 2013	Dinas Pendidikan	30.000.000,00
8	2016	Strategi Organisasi Keagamaan Mahasiswa Dalam Menangkal Radikalisme Islam Di Kampus Unnes	DIPA FIS UNNES	20.000.000,00
9	2016	MODEL PENGEMBANGAN	DIPA UNNES	25.000.000,00

		KONSERVASI CAGAR BUDAYA KOTA LAMA SEMARANG BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
10	2017	PENGEMBANGAN MODEL KAMPUNG WISATA SEBAGAI LABORATORIUM OUT DOOR FIS UNNES (Studi Di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Semarang)	DIPA FIS UNNES	20.000.000,00
11	2017	MODEL PENDIDIKAN BERASRAMA DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA PROGRAM PPG SM-3T DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	DIPA UNNES	100.000.000,00
12	2017	REVITALISASI INDUSTRI TAPIOKA TERINTEGRASI PEMBERDAYAAN SDM HULU-HILIR UNTUK REALISASI SWASEMBADA PANGAN	MP3EI	150.000.000,00
13	2018	EVALUASI PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	DIPA FIS UNNES	21.000.000,00
14	2018	POLITIK GURU HONORER DI KOTA SEMARANG	DIPA UNNES	25.000.000,00
15	2018	MODEL PENDIDIKAN BERASRAMA DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA PROGRAM PPG SM-3T DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	DIPA UNNES	65.000.000,00
16	2019	Kontribusi Modal Sosial	DIPA PNB	25.000.000,00

		dalam Pengembangan Kapasitas Kampung Tematik di Kota Semarang		
17	2019	Pengembangan Big Data Sistem LP3 UNNES untuk Mendukung Layanan Prima LPTK Bereputasi Internasional	DIPA PNBP	100.000.000,00
18	2019	Strategi Pondok Pesantren Lingkar Kampus dalam Mencegah Radikalisme di Kalangan Mahasiswa	DIPA FIS	6.000.000,00
19	2020	<i>Model Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran</i>	DIPA UNNES	100.000.000,00

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2011	peningkatan kesadaran bahaya narkoba bagi generasi muda di sma 4 kota semarang	DIPA Fakultas	2.500.000,00
2	2012	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Jurnal Pada Guru RSBI SMA 4 Kota Semarang	DIPA Fakultas	4.000.000,00
3	2012	Bintek Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru-Guru SD SeKecamatan Boja Kabupaten Kendal	DIPA Fakultas	3.000.000,00
4	2012	bintek penyusunan proposal penelitian tindakan kelas bagi guru-guru sd se-kecamatan bojo kabupaten kendal	DIPA Fakultas	3.000.000,00
5	2012	MODEL PEMBUDAYAAN KONSERVASI PADA ANAK-ANAK DI PERUMAHAN TRANGKIL-KELURAHAN SUKOREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG	DIPA Fakultas	4.000.000,00
6	2013	workshop peningkatan keterampilan menulis artikel ilmiah untuk jurnal bagi guru di sma 6 kota semarang	DIPA Fakultas	6.000.000,00

7	2013	workshop peningkatan ketrampilan menulis artikel ilmiah untuk jurnal bagi guru di sma 6 kota semarang	DIPA Fakultas	6.000.000,00
8	2015	pelatihan public speaking bagi mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang	DIPA Fakultas	2.500.000,00
9	2016	Public Speaking : Upaya Meningkatkan Life Skill Mahasiswa FIS UNNES	DIPA Fakultas	7.000.000,00
10	2017	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA PAKINTELAN SEBAGAI DESA WISATA	DIPA Fakultas	4.500.000,00
11	2017	Penguatan Kapasitas Kemahasiswaan di FIS UNNES	DIPA Fakultas	3.000.000,00
12	2018	Penguatan Karakter Enterpreneuership Wirausahawan Muda Fakultas Ilmu Sosial	DIPA Fakultas	4.500.000,00
13	2019	Langkah Cerdas Generasi Milenial Menghadapi Informasi dan Berita Hoaks Melalui Formula 4.I.	DIPA Fakultas	3.500.000,00
14	2019	Penanaman Nilai Toleransi dalam Menanggulangi Bullying pada Remaja di SMP 3 Ungaran	DIPA Fakultas	3.250.000,00
15	2020	Optimalisasi Model Pembelajaran Student Centered Learning Melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Guna Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SD Negeri Branjang	DIPA Fakultas	3.000.000,00
16	2020	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah bagi Guru SMP N 41 Semarang	DIPA UNNES	9.500.000,00

**E. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral pada Pertemuan/
Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Artikel	Nama Seminar	ISSN Prosiding
1	2016	Model Pendidikan Berasrama Dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa PPG SM3T	Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) 2016	
2	2016	Relevansi dan Urgensi Bela Negara di Kalangan Mahasiswa	Seminar Nasional Optimalisasi Bela Negara Melalui Konservasi dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat	
3	2017	Pengembangan Laboratorium Sekolah pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Pertama	Seminar Nasional HISPISI (Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Berwawasan Kebangsaan)	
4	2017	MODEL PENDIDIKAN BERASRAMA DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER KEBANGSAAN PESERTA PROGRAM PPG SM-3T DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL BERWAWASAN KEBANGSAAN	
5	2017	The Development of Edutourism Village Model Based On Community Empowerment	The 5th ICES (International Conference on Education and Social Sciences)	
6	2018	DEVELOPING NATIONALITY CHARACTER OF PARTICIPANTS IN PPG SM-3T PROGRAM THROUGH BOARDING EDUCATION MODEL AT SEMARANG STATE UNIVERSITY	Annual Civic Education Conference	
7	2018	Thematic Village Implementation : The Implementation of Community Empowerment to	International Conference on Rural Asia (ICoRSIA) 2018	ISSN 2352-5398 ISBN 978-94-6252-727-0

		Develop the Urban Area Local Potency in Semarang City		
8	2018	Empowering and Developing The Local Potency Through Thematic Village in Semarang	International Conference on Rural Asia (ICoRSIA) 2018	ISSN 2352-5398 ISBN 978-94-6252-727-0
9	2018	Pasar Semawis sebagai bentuk toleransi beragama di Kota Semarang	Persidangan Identiti ASEAN	
10	2020	Development of big data system of LP3 UNNES to support excellent service of LPTK on international reputation	6th International Conference on Mathematics, Science, and Education (ICMSE 2019)	
11	2020	A Teacher's Perception of Government Policy About the Mover Teacher	ISET 2020 International Conference on Science, Education and Technology	

F. Pengalaman Menulis Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Penerbit	ISBN
1	2018	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGG	UNNES PRESS	979-957-9333
2	2019	Revitalisasi Tapioka Terintegrasi Pemberdayaan SDM Hulu Hilir	LP2M UNNES	978-623-7618-06-5
3	2020	Hukum Pidana	CV. MAHATA (Magna Raharja Tama)	978-623-92545-1-3
4	2021	Melihat Perspektif: Memahami Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran (Chapter)	LP2M UNNES	978-623-66868-3-6

G. Pengalaman Menulis Artikel Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Artikel	Jurnal	ISSN
1	2017	Innovation and Social Capital in the Development of Embroidery Industry in Nalum Sari Sub District of Jepara Regency, Central Java (A Study in Nalum Sari and Daren Villages)	International Journal of Applied Business and Economic Research (SCOPUS)	0972-7302
2	2018	The Empowerment of	Mimbar	2303-2499

		Upstream-Downstream Human Resources to Revitalise Tapioca Industry		
3	2019	The Dynamics of Public Policy for Non-Permanent Teachers in Semarang, Indonesia	POLITIK INDONESIA: INDONESIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW (Sinta 2)	2477-8060
4	2019	THE INDONESIAN TEACHERS' DILEMMAS FROM COLONIAL TO REFORMASI ERA: NON-PERMANENT TEACHERS' WELFARE AND STATUS ISSUES	Paramita (Sinta 1)	2407-5825
5	2021	Pelatihan Optimalisasi Model Pembelajaran Student Centered Learning melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Guna Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SD Negeri Brangas	Jurnal Implementasi	2747-0768
6	2021	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Bagi Guru SMP N 41 Semarang	Jurnal Implementasi	2747-0768

H. Pengalaman Memperoleh HAKI dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/ Tema Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi	2018	Hak Cipta Buku	EC00201938275
2	Revitalisasi Industri Tapioka Terintegrasi Pemberdayaan SDM Hulu-Hilir	2020	Hak Cipta Buku	000173890

I. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	-------------------------------	-------

1	Dosen Teladan Fakultas Ilmu Sosial	Lokal	2003
2	Penerima HKN Award Bidang Penelitian	Lokal	2006
3	Penerima FIS Award Bidang Penelitian	Lokal	2007

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Semarang, 24 Februari 2021
Anggota,



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP 196501031990021001

Anggota Peneliti 1

Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Isnarto, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	196902251994031001
5	NIDN	0025026903
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Magelang, 25 Februari 1969
7	Alamat Rumah	Jl. Dewi Sartika Barat No. 53 Semarang
8	Nomor Telepon/Faks	081 325 628 516
9	Alamat Kantor	Gedung D7 Lt. 1 FMIPA Universitas Negeri Semarang Jl. Sekaran Gunungpati Semarang
10	Nomor Telpon	024-8508032
11	Alamat email	isnarto.math@mail.unnes.ac.id
12	Lulusan yang telah dihasilkan	74 orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Struktur Aljabar 2. Aljabar Linier 3. Media Pendidikan Matematika 4. Kalkulus

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Semarang	UGM Yogyakarta	UPI Bandung
Bidang Ilmu	Pendidikan Matematika	Matematika	Pendidikan Matematika
Tahun Masuk-Lulus	1988-1993	1998-2000	2011-2014
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Pengaruh Pengontrolan Catatan Pelajaran pada Hasil Belajar Matematika SMP	Ideal Maksimal dalam Ekstensi Torus	Kemampuan Konstruksi Bukti dan Berpikir Kritis Matematis Mahasiswa pada Perkuliahan Struktur Aljabar melalui <i>Guided Discovery Learning</i> Pendekatan <i>Motivation to Reasoning and</i>

			<i>Proving Tasks</i>
Nama Pembimbing/ Promotor	Prof. Dr. Hardi S., M.Pd.	Prof. Dr. Sri Wahyuni, M.S.	Prof. Dr. Wahyudin, M.Pd.

C. Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml
1	2010	Peningkatan Profesionalisme Dosen Pendidikan Matematika melalui <i>Lesson Study</i>	DIK Unnes	10.000.000
2	2011	Mengoptimalkan Kemampuan Mahasiswa dalam Menyerap Materi Bahan Kuliah melalui Pola Pengajaran Berbalik Berbasis Proyek	DIPA PNBP Unnes	10.000.000
3	2015	Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Media Pembelajaran di Sekolah (Ketua)	DIPA PNBP Unnes	20.000.000
4	2015	Inovasi Pembelajaran Humanistik berbasis Konstruktivisme dan Problem Solving untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi dan Karakter (Anggota)	DRPM Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	50.000.000
5	2015	Struktur dan Sifat Radikal Ring Prima Esensial	Mandiri	
6	2016	Pembelajaran Konstruktivisme Bermuatan Pendidikan Karakter Berdasarkan Teori Apos dengan Siklus Ace Adaptif terhadap Keragaman Gaya Belajar	PNBP FMIPA	5.000.000
7	2016	Peningkatan Profesionalisme Dosen Pendidikan Matematika melalui Lesson Study Mata Kuliah Analisis Kompleks	DIK	7.000.000
8	2017	Pengembangan	DIPA Unnes	100.000.000

		Laboratorium Terpadu untuk Mendukung Program Revitalisasi LPTK Universitas Negeri Semarang		
9	2017	Keberlakuan Teorema pada Beberapa Struktur Aljabar	PNBP FMIPA	7.500.000
10	2017	Pengembangan Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Konservasi sebagai Penguat Karakter Mahasiswa	DPRM	100.000.000
11	2018	Pengembangan Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Konservasi sebagai Penguat Karakter Mahasiswa	DPRM	80.000.000
12	2018	Pengembangan Pelaksanaan PPL untuk Mahasiswa Kelas Internasional	DIPA Unnes	100.000.000
13	2018	Pengembangan Alat Peraga Manipulatif dan Aktivitas Pembelajaran Matematika untuk Mendukung Pengembangan HOTS (Higher Order Thinking skill) Siswa Pendidikan Dasar	DRPM	500.000.000
14	2019	Pengembangan Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Konservasi sebagai Penguat Karakter Mahasiswa	DPRM	114.255.000
15	2019	Pengembangan Alat Peraga Manipulatif dan Aktivitas Pembelajaran Matematika untuk Mendukung Pengembangan HOTS (Higher Order Thinking skill) Siswa Pendidikan Dasar	DPRM	265.818.000

16	2020	Model Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran	DIPA Unnes	100.000.000,00
17	2020	Model Penguatan Karakter Konservasi pada Pembelajaran Bukti Matematika	DIPA Unnes	27.500.000,00

D. Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2016	Pendampingan Pelaksanaan PTK dan Penulisan Artikel Ilmiah di MGMP SMA Mata Pelajaran Matematika Kabupaten Jepara	PNBP FMIPA	5.000.000
2	2017	Pelatihan Implementasi Aplikasi Desa-Ku untuk Perangkat Kelurahan Kalisegoro dalam Rangka Memperpendek Birokrasi Pengurusan Surat RT/RW	PNBP FMIPA	4.000.000
3	2017	Peningkatan Kompetensi Guru melalui Penelitian Tindakan Kelas dan Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Guru-Guru di SMP N 2 Demak	DIPA UNNES	15.000.000
4	2018	Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Pelatihan Media Pembelajaran Bagi Guru di Kota Salatiga	DIPA UNNES	10.000.000
5	2019	Pendampingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah berbasis PTK untuk Guru SMP Negeri 41 Semarang	PNBP FMIPA	5.000.000
6	2020	Optimalisasi Model Pelatihan Terpadu dalam Penyusunan ebook Pembelajaran sebagai Implementasi Papperless bagi Guru di SMPN 41 Semarang	DIPA Unnes	9.000.000
7	2020	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran	DIPA Unnes	9.500.000

		Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah bagi Guru SMP N 41 Semarang		
--	--	--	--	--

E. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Artikel	Nama Seminar	ISSN Prosiding/ waktu tempat
1.	2012	Urgensi Nilai-Nilai Matematis pada Pendidikan Agama (Sebuah Pemikiran dalam Kerangka Pendidikan Karakter)	Seminar Nasional MIPA Universitas Negeri Semarang	15 Desember 2012 Unnes
2	2014	Kualitas Konstruksi Bukti Matematis	Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika	24 Mei 2014 UNIROW Tuban
3	2014	<i>Guided Discovery Learning</i> dengan Pendekatan MRP <i>Tasks</i> dalam Perkuliahan Struktur Aljabar	Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX Implementasi.	21 Juni 2014 UKSW Salatiga
4	2015	Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Media Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar	Seminar Nasional Matematika IX Universitas Negeri Semarang	21 November 2015 UNNES
5	2016	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Calon Guru melalui Penguatan Mata Kuliah Dasar Kependidikan	Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016	Universitas Negeri Jakarta 12-15 Oktober 2016/
6	2017	Keberlakuan Teorema pada Beberapa Struktur Aljabar (Penulis Kedua)	Seminar Nasional Matematika XI Tahun 2017	21 Oktober 2017 Jurusan Matematika UNNES
7	2017	Analysis of mathematical literacy in discovery learning approach to realistic-saintific	Proceeding of ICMSE 4 (1), 112-120	
8	2018	Identification of Learning	ISSET 2018	ISBN: 978-

		Model Including Conservation Value in College As A Strength Of Students' Character	International Conference on Science, Education and Technology	94-6252-648-8 ISSN: 2352-5398
9	2018	An Analysis On Generational, Transformational, Global Meta-level Algebraic Thinking Ability In Junior High School Students	ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang	ISSN 1742-6588 ISBN 17426596
10	2018	Mental structure construction of field independent students based on initial proof ability in APOS-based learning	ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang	ISSN 1742-6588 ISBN 17426596
11	2018	Development of 3CM (cool-critical-creative-meaningful) learning model to increase creative thinking skill	ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang	ISSN 1742-6588 ISBN 17426596
12	2018	Respon Siswa terhadap Penggunaan Puzzle Tangram-7 sebagai Alat Peraga Manipulatif Individual dalam Ujicoba Terbatas Pembelajaran Matematika dengan HOTS	Seminar Nasional Matematika	
13	2018	Kemampuan Menganalisis Argumen dalam Berpikir Kritis Ditinjau dari Rasa Ingin Tahu	Seminar Nasional Matematika	
14	2018	<u>Keberlakuan Teorema pada Beberapa Struktur Aljabar</u>	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 1, 928-935	
15	2018	<u>Kemampuan Mengkonstruksi Bukti Pada Materi Grup Dalam Pembelajaran Berbasis Apos</u>	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 1, 551-558	
16	2018	<u>Meningkatkan Kemampuan Pembuktian Induktif Kelas XII SMA N 7 Semarang pada Materi Induksi Matematika Melalui Pembelajaran Model TAI</u>	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 1, 12-17	
17	2018	<u>OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</u>	SNKPPM 1 (1), 210-216	

		<u>MELALUI PELATIHAN MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU DI KOTA SALATIGA</u>		
13	2019	Seminar Nasional Paradigma dan Tantangan Pendidikan Indonesia Era Industri 4.0	Seminar Nasional Paradigma dan Tantangan Pendidikan Indonesia Era Industri 4.0	FKIP Universitas Kristen Indonesia Toraja Sulawesi Selatan
14	2019	An Analysis On Generational, Transformational, Global Meta-level Algebraic Thinking Ability In Junior High School Students	ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang	ISSN 1742-6588 ISBN 17426596
15	2019	Mental structure construction of field independent students based on initial proof ability in APOS-based learning	ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang	ISSN 1742-6588 ISBN 17426596
16	2019	Development of 3CM (cool-critical-creative-meaningful) learning model to increase creative thinking skill	ICMSE FMIPA Universitas Negeri Semarang	ISSN 1742-6588 ISBN 17426596
17	2019	The Conservation Values Integration Model in Scientific Approach of Civics in College	ISET 2019 International Conference on Science, Education and Technology	
18	2019	Conservation and Literacy Values in Reading Lectures of Indonesian Language with Problem Based Learning Model	1st International Conference on Language and Language Teaching	ISBN 978-1-63190-226-0 ISSN 2593-7650
19	2019	Analysis of Mathematics Modeling Student Ability in Algebraic Critical Thinking and Form of the Scaffolding	ISET 2019 International Conference on Science, Education and Technology	
20	2019	Pengaruh model problem based learning dengan immediate feedback assesment technique terhadap pencapaian komunikasi matematis	SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UNNES 2019	2613-9189

21	2019	Resiliensi Matematis pada Pembelajaran Discovery Learning dalam Upaya Meningkatkan Komunikasi Matematika	PRISMA	2613-9189
22	2019	Kemampuan Menganalisis Argumen dalam Berpikir Kritis Ditinjau dari Rasa Ingin Tahu	PRISMA	2613-9189
23	2019	Efektivitas pembelajaran flipped classroom dengan pendekatan matematika realistik Indonesia terhadap kemampuan representasi ditinjau dari self-efficacy	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 116-123	2613-9189
24	2019	Resiliensi Matematis pada Pembelajaran Discovery Learning dalam Upaya Meningkatkan Komunikasi Matematika	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 116-123	2613-9189
25	2019	Kemampuan literasi matematika siswa pada pembelajaran brain based learning	Prisma, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 34-39	2613-9189
26	2019	Pentingnya Koneksi Matematika dan Self-Efficacy pada Pembelajaran Matematika SMA	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 679-686	2613-9189
27	2019	Kemampuan Representasi Matematis dalam Model Pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually (SAVI)	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 287-292	2613-9189
28	2019	Respon Siswa terhadap Penggunaan Puzzle Tangram-7 sebagai Alat Peraga Manipulatif Individual dalam Ujicoba Terbatas Pembelajaran Matematika dengan HOTS	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 305-312	2613-9189
29	2019	The Analysis of The Students' Creative Thinking Ability in Mathematics as Viewed from their Learning Style and Educational Background	6th International Conference on Educational Research and Innovation	

			(ICERI ...	
30	2019	Penggunaan Model Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Self Efficacy Matematika Siswa Kelas VIII-B SMPN 13 Semarang	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2, 479-489	2613-9189
31	2019	Kemampuan Literasi dalam Menyelesaikan Soal Ujian Nasional Berbasis Komputer yang Mempunyai Daya Serap Rendah Siswa Kelas XII	Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS) 2 (1), 1126-1135	
32	2020	Pengaruh model problem based learning dengan immediate feedback assesment technique terhadap pencapaian komunikasi matematis	PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 3, 247-251	
33	2020	A Teacher's Perception of Government Policy About the Mover Teacher	ISET 2020 International Conference on Science, Education and Technology	

F. Pengalaman Menulis Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Penerbit	ISBN
1	2018	Pembelajaran Menyimak Bahasa Indonesia (editor)	LP3 UNNES	978-602-74975-7-3
2	2018	Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Konsevasi	LP3 UNNES	978-602-74975-6-6
3	2020	Pengantar Dasar Statistika Berbasis Masalah	CV. Jakad Media Publishing (Anggota IKAPI)	978-623-7681-81-6
4	2021	Melihat Perspektif: Memahami Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran (Chapter)	LP2M UNNES	978-623-66868-3-6

G. Pengalaman Menulis Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel	Tahun	Jurnal	ISSN
1	<i>Students' Proof Ability:</i>	2014	<i>International Journal</i>	

	<i>Exploratory Studies of Abstract Algebra Course</i>		<i>of Education and Research (IJER)</i>	
2	Pengembangan Karakter Kedisiplinan dan Kemampuan Pemecahan Masalah melalui Model LAPS-Heuristik Materi Lingkaran Kelas-VIII	2015	Jurnal Profesi Keguruan LP3 Unnes	
3	Keefektifan Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dengan Teknik Probing Prompting Berbantuan CD Pembelajaran terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VII	2015	Unnes Journal of Mathematics Education 4 (3)	
4	Analisis kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran model auditory intellectually repetition	2016	Unnes Journal of Mathematics Education 5 (3), 243-249	
5	Representasi Matriks Homomorfisma Modul	2017	JURNAL MIPA	
6	Struktur Modul atas Polinomial pada Ruang Vektor (Suatu Model Aplikasi Struktur Aljabar pada Aljabar Linier)	2017	SAINTEKNOL	
7	Kemampuan Penalaran Geometris Siswa pada Pembelajaran RME dengan Penekanan Hands on Activity Berdasarkan Aktivitas Belajar	2017	Unnes Journal of Mathematics Education Research	
8	The Analysis of Mathematical Literacy on Realistic Problem-Based Learning with E-Edmodo Based on Student's Self Efficacy	2017	Journal of Primary Education	
9	STUDY ON CRITICAL THINKING SKILLS BASIC PROSPECTIVE STUDENTS PRIMARY SCHOOL TEACHER	2017	International Journal of Contemporary Applied Sciences (IJCAS)	
10	Krulik and Rudnik Model Heuristic Strategy in Mathematics Problem	2017	International Journal on Emerging Mathematics	

	Solving		Education	
11	Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Self Efficacy Peserta Didik melalui Inductive Discovery Learning	2017	Unnes Journal of Mathematics Education Research 6 (2), 242-250	
12	Influence of IQ and mathematical disposition toward the problem solving ability of learners grade VII through PBL learning model with the assistance LKPD	2017	Unnes Journal of Mathematics Education 6 (3), 352-359	
13	Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran Model Connecting Organizing Reflecting Extending Ditinjau dari Kecerdasan Emosional	2017	Journal of Primary Education 6 (3), 267-276	
14	Pengembangan Laboratorium Media Pembelajaran Berbasis Kebutuhan Sekolah	2017	Jurnal Profesi Keguruan 3 (2), 244-252	
15	Analysis of Mathematical Problem Solving Ability Based on Student Learning Stages Polya on Selective Problem Solving Model	2017	Unnes Journal of Mathematics Education 6 (1), 19-26	
16	The Position and Causes of Students Errors in Algebraic Thinking Based on Cognitive Style	2018	International Journal of Instruction	1308-1470
17	Identification of Learning Model Including Conservation Value in College As A Strength Of Students' Character	2018	Advances in Social Science, Education and Humanities Research	2352-5398
18	Student Critical Thinking Viewed from Mathematical Self-efficacy in Means Ends Analysis Learning with the Realistic Mathematics Education Approach	2018	Unnes Journal of Mathematics Education Research	2502-4507
19	Students' Mathematical Literacy Based on Self-Efficacy By Discovery Learning With Higher Order Thinking Skills-Oriented	2018	Unnes Journal of Mathematics Education Research	2502-4507

20	Mathematical Connection Abilities and Self-Esteem of Students on Model-Eliciting Activities Learning with a Realistic Approach	2018	Unnes Journal of Mathematics Education Research 7 (1), 161-166	
21	Mathematical Reasoning Based on Belief in PBL with Dyadic Interaction Approach	2018	Unnes Journal of Mathematics Education Research 7 (1), 48-53	
22	Analysis of mathematical literacy ability on PjBL model assisted by observation independent task	2018	Unnes Journal of Mathematics Education 7 (2), 129-136	
23	The analysis of student's mathematical communication ability viewed from learning styles through project based learning models on cylinder and cone materials	2018	Unnes Journal of Mathematics Education 7 (3), 156-163	
24	Mathematically creative thinking abilities students of elementary school on learning inquiry training based on learningstyle	2018	Journal of Primary Education 7 (2), 121-128	
25	The Influence of Statistical Anxiety on Statistic Reasoning of Pre-service Mathematics Teachers	2019	Bolema - Mathematics Education Bulletin	1980-4415
26	Schemata's Influence On Mathematical Problem Solving Skills	2019	International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)	2277-8616
27	The Use Of 3CM (Cool-Critical-Creative-Meaningful) Model In Blended Learning To Improve Creative Thinking Ability In Solving Mathematics Problem	2019	Journal of Educational Science and Technology (EST) 5 (1), 26-38	
28	Analysis of mathematical representation skills based on student learning activities in hands on activity assisted PBL learning model	2019	Unnes Journal of Mathematics Education Research 8 (2), 213-219	
29	A Practicallity Analysis Of Collaborative Assessment Model Based On Ethnomathematics	2019	Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems	1943-023X

30	KEMAMPUAN MATEMATIS MAHASISWA DALAM PENERAPAN ASESMEN KOLABORATIF	2019	Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan 10 (1), 113-120	
31	Mathematical Communication Skills Reviewed From Mathematical Resilience in Independent Learning and Discovery Learning Assisted by E-Learning	2019	Unnes Journal of Mathematics Education Research, 112-120	
32	The Implementation of PBL (Problem Based Learning) Model Assisted by Monopoly Game Media in Improving Critical Thinking Ability and Self Confidence	2019	Journal of Primary Education 8 (2), 200-208	
33	Students' Mathematical Literacy Based on Self-Esteem By Brain Based Learning With Trigo-Fun E-Module	2019	Unnes Journal of Mathematics Education Research	
34	PENENTUAN NILAI EIGEN SUATU MATRIKS DENGAN METODE PANGKAT (POWER METHOD)	2019	Unnes Journal of Mathematics 8 (2), 69-78	
35	Quality Management of Mathematics Manipulative Products to Support Students' Higher Order Thinking Skills	2020	International Journal of Instruction	1308-1470
36	Mathematical Communication Profile in Solving Probability Problems Reviewed by Self-efficacy of Prospective Mathematics Teachers	2020	Universal Journal of Educational Research	2332-3205
37	The Level of Meta-global Algebraic Critical Thinking Ability of Mathematics Education Students	2020	INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH	2277-8616
38	Schemata and creative thinking ability in cool-critical-creativemeaningful (3CM) learning	2020	International Journal of Sustainability in Higher Education	1467-6370

39	Students' Creative Thinking Ability and Thinking Schemata in CoolCritical-Creative-Meaningful (3CM) Learning	2020	International Journal of Innovation, Creativity and Change	2201-1323
40	The Statistical Reasoning Obstacles of Mathematics Pre-Service Teacher on Descriptive Statistics	2020	International Journal of Advanced Science and Technology	2005-4238
41	Mathematical Communication Profile in Solving Probability Problems Reviewed by Self-efficacy of Prospective Mathematics Teachers	2020	Universal Journal of Educational Research	2332-3205
42	STRUCTURES CONSTRUCTION ON THE ACE LEARNING	2020	Journal of Critical Reviews	2394-5125
43	Mathematics Representation Ability Viewed from Adversity Quotient in SAVI Learning	2020	Unnes Journal of Mathematics Education Research 9 (2), 199-207	
44	Mathematical Connection Ability Based on Self-Efficacy in IDEAL Problem Solving Model Assisted by ICT	2020	Unnes Journal of Mathematics Education Research 9 (2), 139-146	
45	The impact of 3CM model within blended learning to students' creative thinking ability	2020	JOTSE 10 (1), 32-46	
46	Mathematical Problem Solving Ability of Vocational School Students Reviewed from Self Regulated Learning in Selective Problem Solving (SPS) Assisted Learning Management System	2020	Unnes Journal of Mathematics Education Research, 171-180	
47	Pendekatan Saintifik Dalam Perspektif Teori Belajar Vygotsky	2020	Didactical Mathematics 2 (3), 109-114	
48	Problem-Solving Ability in terms of Adversity Quotient On SFE Learning Based on Firing Line	2020	Unnes Journal of Mathematics Education Research 9 (1), 78-85	

49	Mathematical communication of 7th-grade students viewed from the attitude of curiosity in Guided Discovery Learning assisted by educational props	2020	Unnes Journal of Mathematics Education 9 (1), 20-27	
50	Analysis of the ability to interpreting information in algebraic critical thinking	2020	Unnes Journal of Mathematics Education 8 (3), 157-164	
51	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Bagi Guru SMP N 41 Semarang	2021	Jurnal Implementasi	2747-0768
52	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Bagi Guru SMP N 41 Semarang	2021	Jurnal Implementasi	2747-0768
53	Students' Mathematical Communication Skills based on AQ in Discovery Learning Model with Realistic Approach	2021	Unnes Journal of Mathematics Education Research, 220-231	

A. Pengalaman Memperoleh HAKI dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/ Tema Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Puzzle Tangram-7	2018	APM	000130222
2	Hotools	2018	Merk Dagang	D092018045702
3	Model pembelajaran Di Perguruan Tinggi Berbasis Konservasi	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201854149
4	Struktur Tubuh Hewan	2019	Video Pembelajaran	EC002019455187
5	Pengantar Struktur Aljabar	2019	Video Pembelajaran	EC00201945189
6	Manajemen Sekolah	2019	Video Pembelajaran	EC00201945185
7	APM Konsep Pecahan dan Pecahan Senilai	2019	APM	000155603
8	APM Penjumlahan dan	2019	APM	000155602

	Pengurangan Pecahan			
9	APM Perkalian dan Pembagian Pecahan	2019	APM	000155604
10	Pembelajaran Membaca (Bahasa Indonesia)	2020	Buku (Hak Cipta)	EC00202012045
11	Pendidikan Kewarganegaraan	2020	Buku (Hak Cipta)	EC00202012044
12	HOTOOLS	2020	Merk Dagang	IDM000756063
13	Puzzle Bilangan 15	2020	Hak Cipta	000190888
14	Puzzle Pecahan 3/4	2020	Hak Cipta	000190887
15	Pengantar Dasar Statistika Berbasis Masalah	2020	Hak Cipta	EC00202029399
16	MESIN PENGEPON PNEUMATIK HEMAT ENERGI	2020	Paten Sederhana	IDS000003279

H. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1	Lulusan Terbaik Program Doktor	UPI Bandung	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian.

Semarang, 24 Februari 2021
Pengusul



Dr. Isnarto, M.Si.
NIP 196902251994031001

Anggota Peneliti 2

B. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	198509272015041001
5.	NIDN	0627098503
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarnegara, 27 September 1985
7.	Alamat Rumah	Puntan RT 2 RW 1, Kel. Ngijo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang
8.	Nomor Telepon/Faks	085640240001
9.	Alamat Email	aseppyu@mail.unnes.ac.id
10.	Lulusan yang telah dihasilkan	-
11.	Mata Kulian yang Diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran Membaca 2. Pembelajaran Berbicara 3. Menyimak 4. Pragmatik 5. MKU Bahasa Indonesia 6. Sintaksis 7. Semantik 8. Fonologi 9. Pendidikan Konservasi

C. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNNES	UNNES	
Bidang Ilmu	Pengajaran Bahasa	Pengajaran Bahasa	
Tahun Masuk-Lulus	2004-2008	2010-2012	
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pengembangan Buku Panduan Menulis Laporan dengan Pendekatan Kontekstual bagi Siswa Kelas VIII SMP	Pengembangan Perangkat Evaluasi berdasarkan Taksonomi <i>The Structure Of The Observed Learning Outcome</i> (SOLO) Kompetensi Menulis Kelas V SD	
Nama Pembimbing/Promotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Subyantoro, M.Hum. 2. Drs. Wagiran, M.Hum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Rustono, M.Hum. 2. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum. 	

D. Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
2	2014	Pengembangan Model Evaluasi Berbasis Portofolio pada Mata Kuliah Umum Di Universitas Negeri Semarang	DIPA Unnes	17.500.000,00
3	2014	Pengembangan Media Interaktif Menyunting Karangan Bermuatan Nilai-Nilai Karakter Berbasis TIK pada Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia	DIPA Unnes	10.000.000,00
4	2015	Model Pengembangan Kampus Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2015-2019	DIPA Unnes	27.500.000,00
5	2016	Pengembangan Media Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bermuatan Nilai Konservasi	DIPA Unnes	12.000.000,00
6	2017	Pengembangan Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Konservasi sebagai Penguat Karakter Mahasiswa	Dilibtabmas Dikti	79.025.000,00
7	2017	Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Membaca sebagai Penguatan Literasi Bermuatan Nilai Konservasi di Universitas Negeri Semarang	DIPA Unnes FBS	17.500.000,00
8	2017	Implementasi Model <i>Problem Based Learning</i> Bermuatan Konservasi pada Mata Kuliah Pembelajaran Berbicara	DIPA Unnes FBS	5.500.000,00
9	2018	Tingkat Literasi Baca Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang	DIPA Unnes FBS	7.500.000,00
10	2018	Pengembangan Teks Bergenre Cerita Bermuatan Nilai Konservasi	DIPA Unnes	25.000.000,00
11	2018	Identifikasi dan Karakterisasi Literasi di Perguruan Tinggi sebagai Wujud Konservasi Budaya	Dilibtabmas Dikti	70.000.000,00
12	2019	Identifikasi dan Karakterisasi Literasi di	Dilibtabmas Dikti	39.587.500,00

		Perguruan Tinggi sebagai Wujud Konservasi Budaya		
13	2019	Identifikasi dan Analisis Isi dan Bahasa pada Jurnal Sastra Indonesia	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	14.000.000,00
14	2019	Identifikasi Berita Bohong (Hoax) Berbahasa Indonesia pada Instagram dengan Metode K-Means	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	10.000.000,00
15	2020	Analisis Kualitas dan Produksi Artikel Jurnal Sastra Indonesia	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	12.000.000,00
16	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR DAN IMPLIKATUR PADA WACANA PRAGMATIK DI MEDIA SOSIAL DAN MEDIA KONVENSIONAL	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	10.000.000,00
17	2020	Identifikasi Literasi dan Kesiapan Karir Mahasiswa Menghadapi Kampus Merdeka	DIPA Unnes	30.000.000,00
18	2020	Model Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran	DIPA Unnes	100.000.000,00

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2014	Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Kurikulum 2013 Bagi Guru Bahasa Indonesia di Kabupaten Kebumen	DIPA Unnes	6.000.000,00
2	2015	Pelatihan Pengembangan Materi Seni Budaya Berbasis Kurikulum 2013 Bagi Guru SD di Kab. Wonosobo	DIPA Unnes	6.000.000,00
3	2015	Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas dan Artikel Ilmiah Bagi Guru SMA di Kabupaten Banjarnegara	DIPA Unnes	6.000.000,00
4	2016	Konservasi Budaya melalui Pelatihan Teater bagi Mahasiswa dan Pentas Keliling di Jawa Tengah	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	5.800.000,00
5	2017	IbM Guru SMA/SMK di	DIPA Unnes	6.000.000,00

		Kabupaten Wonosobo Meningkatkan Kompetensi Paedagogik melalui Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran	Fakultas Bahasa dan Seni	
6	2017	IbM Guru di Kabupaten Wonosobo untuk Meningkatkan Keterampilan Menyunting Karya Ilmiah Melalui pelatihan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Bermuatan Nilai Konservasi	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	5.344.000,00
7	2018	Optimalisasi Self-Publishing dalam Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Publikasi Karya bagi Guru di Kota Salatiga	DIPA Unnes	10.000.000
8	2018	Pengembangan Kemampuan Kiat Membaca bagi Guru-Guru di Kota Salatiga dalam Menyukkseskan Gerakan Literasi Sekolah	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	1.800.000
9	2019	Optimalisasi Digital Library dalam Pelatihan Penyusunan Soal High Order Thinking Skills (HOTS) Bermuatan Nilai Karakter bagi Guru Bahasa Indonesia SMA/SMK di Kota Salatiga	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	5.000.000
10	2019	Optimalisasi Laman Bahasa dan Sastra dalam Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar guna Meningkatkan Kualitas Literasi bagi Guru SMA/SMK di Kota Salatiga	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	5.000.000
11	2020	Optimalisasi Model Pelatihan Terpadu dalam Penyusunan ebook Pembelajaran sebagai Implementasi Papperless bagi Guru di SMPN 41 Semarang	DIPA Unnes	9.000.000
12	2020	PELATIHAN MENULIS SYI'IR (SYAIR SALAWAT) BERMUATAN KONSERVASI BAGI SANTRI PONDOK PESANTREN AZZUHRI KETILENG SEMARANG	DIPA Unnes Fakultas Bahasa dan Seni	5.000.000
13	2020	Pengembangan Produk Craft dari Limbah Pertanian di Dusun	DIPA Unnes	9.500.000

		Tabaggunung Desa Brongkol Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang		
--	--	---	--	--

**F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral pada Pertemuan/
Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Artikel	Nama Seminar	ISSN Prosiding
1.	2015	Internalisasi Nilai melalui Seni dan Sastra pada Anak sebagai Upaya Konservasi Budaya	ICCBL Unnes 2015	
2	2016	Pengembangan Media Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Bermuatan Nilai Konservasi	Konferensi Bahasa dan Sastra 2016	978 602 8054 11 9
3	2016	Model Wacana Berwawasan Nilai Konservasi Berbasis Ekolinguistik	Konferensi Bahasa dan Sastra 2016	978 602 8054 11 9
4	2017	Implementasi Literasi dan Nilai Konservasi dalam Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada Mata Kuliah Pembelajaran	Konferensi Bahasa dan Sastra 2017	ISSN 2598-0610 E-ISSN 2598-0629
5	2018	Manuskrip Kebudayaan Lisan Kabupaten Wonogiri	The 1st International Conference On Education Language And Literature (Icon-Elite) 2018	978-602-504-217-1
6	2018	Identifikasi Literasi Minat Menulis di Perguruan Tinggi sebagai Wujud Konservasi Budaya	Konferensi Bahasa dan Sastra 2017	ISSN 2598-0610 E-ISSN 2598-0629
7	2018	Identification of Learning Model Including Conservation Value in College As A Strength Of Students' Character	ISET 2018 International Conference on Science, Education and Technology	ISBN: 978-94-6252-648-8 ISSN: 2352-5398
8	2018	Identification of Students' Interest of Literacy At College As A Form Of Cultural Conservation	ISET 2018 International Conference on Science, Education and	ISBN: 978-94-6252-648-8 ISSN: 2352-5398

			Technology	
9	2018	NILAI-NILAI PENDIDIKAN PROFETIK PADA BUKU TEKS BAHASA INDONESIA SMA KELAS X	Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia (PIBSI) 2018	
10	2018	OPTIMALISASI SELF-PUBLISHING DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PUBLIKASI KARYA BAGI GURU DI KOTA SALATIGA	SNK-PPM UNNES-UNDIP 2018	ISSN 2655-6235
11	2019	The Characteristics of College Students' Reading Comprehension, Critical Reading, and Creative Reading Skill	ISET 2018 International Conference on Science, Education and Technology	
12	2019	The Conservation Values Integration Model in Scientific Approach of Civics in College	ISET 2018 International Conference on Science, Education and Technology	
13	2019	Conservation and Literacy Values in Reading Lectures of Indonesian Language with Problem Based Learning Model	1st International Conference on Language and Language Teaching	ISBN 978-1-63190-226-0 ISSN 2593-7650
14	2019	Identification and Characterization of Writing Skill in University	1st International Conference on Language and Language Teaching	ISBN 978-1-63190-226-0 ISSN 2593-7650
15	2019	OPTIMALISASI LAMAN BAHASA DAN SASTRA DALAM PELATIHAN PENYUSUNAN BAHAN AJAR GUNA MENINGKATKAN KUALITAS LITERASI BAGI GURU SMA/SMK DI KOTA	SNK-PPM UNNES-UNDIP 2019	

SALATIGA				
16	2019	The Conservation Values Integration Model in Scientific Approach of Civics in College	5th International Conference on Science, Education and Technology, ISET 2019	978-1-63190-216-1
17	2020	A Teacher's Perception of Government Policy About the Mover Teacher	ISET 2020 International Conference on Science, Education and Technology	
18	2020		ICMSE	

G. Pengalaman Menulis Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Penerbit	ISBN
1.	2015	Pendidikan Konservasi	MAGNUM	978-602-1217-15-3
2.	2015	Catatan Akhir Perkuliahan: Berkas Alir Pikir (Penyusun)	UNNES PRESS	978 602 285 061 8
3.	2015	Catatan Akhir Perkuliahan: Seandainya Kuliah Seindah FTV (Penyusun)	UNNES PRESS	978 602 285 062 5
4	2016	Pendidikan Konservasi berbasis Ekolinguistik: Seri Buku Pengayaan	LP3 UNNES	978 602 74975 0 4
5	2016	Buku Ajar Pendidikan Konservasi	UNNES PRESS	978 602 285 077 9
6	2016	Catatan Akhir Perkuliahan: Nasionalisme dalam Tulisan (Penyusun)	Prima Cipta Nusantara dengan LP3 UNNES	978 602 805 499 7
7	2016	Catatan Akhir Perkuliahan: Rumah Ilmu Rumah Kita (Penyusun)	Prima Cipta Nusantara dengan LP3 UNNES	978 602 658 901 9
8	2016	Catatan Akhir Perkuliahan: Parikan Konservasi (Penyusun)	Prima Cipta Nusantara dengan LP3 UNNES	978 602 805 498 0
9	2018	Manuskrip Cerita Rakyat Wonogiri (Editor)	Prima Cipta Nusantara	978-602-6589-94-1
10	2018	Pendidikan Konservasi: Tiga Pilar	UNNES PRESS	978 602 285 115 8
11	2018	Kata Teman	Prima Cipta Nusantara	978-602-6589-96-5

12	2018	Pembelajaran Menyimak Bahasa Indonesia	LP3 UNNES	978-602-74975-7-3
13	2018	Model Pembelajaran di Perguruan Tinggi Berbasis Konsevasi	LP3 UNNES	978-602-74975-6-6
14	2018	Puisi Membawa Kesan (Editor)	LP3 UNNES	978-602-74975-8-0
15	2020	SYAIR ALITQON (KUMPUNAN SYAIR)	LPPM UNNES	9 786236 686362
16	2021	Melihat Perspektif: Memahami Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran (Chapter)	LP2M UNNES	978-623-66868-3-6
17	2021	Melihat Perspektif: Cara Pandang Mahasiswa Menghadapi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (Chapter)	LP2M UNNES	978-623-66868-3-6

H. Pengalaman Menulis Artikel Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Artikel	Jurnal	ISSN
1.	2017	PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF MENYUNTING KARANGAN BERMUATAN NILAI-NILAI KARAKTER BERBASIS TIK PADA MATA KULIAH UMUM BAHASA INDONESIA	Jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia	2503-3476
2.	2018	IDENTIFIKASI TEKS BERGENRE CERITA BERMUATAN NILAI KONSERVASI	LINGUA	2549-3183
3.	2019	Kesalahan Bahasa pada Manuskrip Artikel Mahasiswa di Jurnal Sastra Indonesia	Jurnal Sastra Indonesia	2685-9599
4	2019	OPTIMALISASI DIGITAL LIBRARY DALAM PELATIHAN PENYUSUNAN SOAL HIGH ORDER THINKING SKILLS (HOTS) BERMUATAN NILAI KONSERVASI	Indonesian Journal of Conservation	2714-6189
5	2019	The implication of humor discourse in the Tonight Show television program	Journal of Social Studies (JSS) 15 (2), 145-162	2721-4036
6	2020	TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM CUITAN AKUN TWITTER @FiersaBesari	LOGAT: Jurnal Bahasa Indonesia dan Pembelajaran	2685-2993
7	2020	Analysis of Directive Speech Acts in Mata Najwa Youtube Channel "Because of Corona:	AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra	2580-9040

		Why Indonesia Is Not Like Singapore"	Indonesia	
8	2020	TINDAK TUTUR DIREKTIF, EKSPRESIF, DEKLARASI DALAM VIDEO CHANNEL YOUTUBE KISAH TANAH JAWA PADA EPISODE GERBANG ANTAR DIMENSI BULAN FEBRUARI 2020	Logat: Jurnal Bahasa Indonesia dan Pembelajaran	2685-2993
9	2020	Tindak Tutur Ilokusi dalam Video Podcast Deddy Corbuzier dan Najwa Shihab pada Media Sosial Youtube	Jurnal Ilmiah Telaah	2620-6226
10	2020	Analisis Tindak Tutur Direktif Pada Ceramah Ustadz Abdul Somad Edisi Tanya Jawab Kajian Musawarah Bersama Artis Hijrah	Estetik: Jurnal Bahasa Indonesia	2622-1829
11	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM VLOG Q&A SESI 3 PADA KANAL YOUTUBE SHERLY ANNAVITA RAHMI	UNDAS: JURNAL HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA	1858-4470
12	2020	Tindak Tutur Direktif Pelatih Drum Corps Sabda Kinnara Drum Corps	ALINEA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran	2614-7599
13	2020	TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM CUITAN AKUN TWITTER GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO	Metabahasa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2656-5579
14	2020	ANALISIS IMPLIKATUR PERCAKAPAN DALAM TUTURAN FILM LASKAR PELANGI	Matapena: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya	2621-9042
15	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR EKSPRESIF RADIO PRAMBORS PROGRAM SAPA MANTAN	CARAKA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Pembelajarannya	2579-4485
16	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM WACANA	CARAKA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan	2579-4485

		STAND UP COMEDY INDONESIA SESI 3 BABE CABITA DI KOMPAS TV	Pembelajarannya	
17	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR LOKUSI DALAM AKUN TWITTER FIERSA BESARI	METAFORA	2407-2400
18	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR ILOKUSI DI CUITAN AKUN TWITTER @SUDJIWOTEDJO PADA BULAN FEBRUARI 2020	KADERA BAHASA	2623-2049
19	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR PERLOKUSI DALAM KONPERS PRESIDEN SOAL COVID-19 PADA SALURAN YOUTUBE CNN INDONESIA	Metamorfosis	1978-9842
20	2020	TINDAK TUTUR PERLOKUSI DALAM DIALOG FILM “THE TEACHER’S DIARY” DENGAN SUBTITLE BAHASA INDONESIA	SKRIPTA: JURNAL PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	2443-3705
21	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM BERITA DOKTER DETEKSI VIRUS CORONA MENINGGAL DI WUHAN PADA SALURAN YOUTUBE TRIBUNNEWS.COM	SKRIPTA: JURNAL PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	2443-3705
22	2020	Tindak Tutur Perlokusi pada Dialog Film “Keluarga Cemara” Karya Yandy Laurens	Dinamika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya	2715-8381
23	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR REPRESENTATIF DALAM PODCAST DEDDY CORBUZIER DENGAN NADIEM MAKARIM-KULIAH TIDAK PENTING?	Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2541-3252
24	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR EKSPRESIF DALAM NOVEL HUJAN	Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra	2541-3252

		BULAN JUNI KARYA SAPARDI DJOKO DAMONO	Indonesia	
25	2020	ANALISIS PRAGMATIK: KESANTUNAN BERBAHASA DALAM FILM RAKSASA DARI JOGJA PRODUKSI STARVISION PLUS ADAPTASI NOVEL KARYA DWITASARI	Jurnal Lentera (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia)	2622-5573
26	2020	ANALISIS TINDAK TUTUR PADA IKLAN PRODUK POND'S TONE UP CREAM DI YOUTUBE	Jurnal Lentera (Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia)	2622-5573
27	2020	Directive speech act in President Joko Widodo's speech related to handling coronavirus (Covid-19) in Indonesia (Pragmatic review)	Journal of Social Studies	2721-4036
28	2020	IMPLIKATUR PERCAKAPAN PADA KONFLIK INTERPERSONAL REMAJA DALAM FILM DILAN 1991	Magistra Andalusia: Jurnal Ilmu Sastra	2656-6230
29	2020	IMPLIKATUR PADA BAHASA IKLAN ROKOK DJARUM COKLAT TAHUN 2010--2020: SEBUAH KAJIAN PRAGMATIK	KADERA BAHASA: JURNAL ILMIAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	2623-4850
30	2020	IMPLIKATUR PERCAKAPAN RIDWAN REMIN DALAM ACARA STAND UP COMEDY	Magistra Andalusia: Jurnal Ilmu Sastra	2656-6230
31	2020	Analisis Kesalahan Sintaksis pada Teks Berita Daring berjudul Mencari Etika Elite Politik di saat Covid-19	Jurnal Bahasa dan Sastra	2302-3538
32	2021	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka	Jurnal Implementasi	2747-0768

		Belajar di Sekolah Bagi Guru SMP N 41 Semarang		
33	2021	ANALISIS TINDAK TUTUR DIREKTIF PADA FILM KELUARGA CEMARA KARYA YANDY LAURENS	Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	2715-9132
34	2021	Pengembangan Produk Craft dari Limbah Pertanian di Dusun Tabaggunung, Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang	Jurnal Implementasi	2747-0768
35	2021	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Bagi Guru SMP N 41 Semarang	Jurnal Implementasi	2747-0768

I. Pengalaman Memperoleh HAKI dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/ Tema Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pendidikan Konservasi berbasis Ekolinguistik	2016	Buku (Hak Cipta)	C00201605276
2.	Parikan Konservasi	2018	Buku (Hak Cipta)	000106289
3.	Rumah Ilmu Rumah Kita	2018	Buku (Hak Cipta)	000106177
4.	PENGALAMAN TENTANG KATA	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201944735
5.	PENDIDIKAN KONSERVASI	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201939345
6.	REVOLISI MENTAL	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201944743
7.	Model pembelajaran Di Perguruan Tinggi Berbasis Konservasi	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201854149
8.	Struktur Tubuh Hewan	2019	Video Pembelajaran	EC002019455187
9.	Pengantar Struktur Aljabar	2019	Video Pembelajaran	EC00201945189
10.	Manajemen Sekolah	2019	Video Pembelajaran	EC00201945185
11.	Generasi Milenial	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201944738

12.	PENDIDIKAN KONSERVASI TIGA PILAR	2019	Buku (Hak Cipta)	EC00201938544
13.	Pembelajaran Membaca (Bahasa Indonesia)	2020	Buku (Hak Cipta)	EC00202012045
14.	Ayo Menulis (Mempersiapkan Tulisan, Menulis Dan Menuntaskannya, dan Menyunting Tulisan)	2020	Video	EC00202050810
15.	Pendidikan Kewarganegaraan	2020	Buku (Hak Cipta)	EC00202012044
16.	Buku Konservasi Konservasi Berkelanjutan UNNES 2019	2020	Buku (Hak Cipta)	EC00202030649

Semarang, 24 Februari 2021

Anggota,



Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd.
NIP 198509272015041001

Anggota Peneliti 3

Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Didi Pramono, S.Pd., M.Pd.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	Pangkat/Golongan/Ruang	Penata Muda Tk. I - III/b
5	NIP	1988120120160811007
6	NIDN	8852440017
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Brebes, 1 Desember 1988
8	Alamat Rumah	Cluster Annisa I No. 1 RT 04/RW 04 Desa Mangunsati Kel. Mangunsari Kec. Gunungpati 50228 Kota Semarang
9	Nomor Telepon/Faks	085640804990
10	Alamat Email	didipramono@mail.unnes.ac.id
11	Mata Kulian yang Diampu	1. Pembelajaran Inovatif Sosiologi 2. Praktik Produksi Media Pembelajaran Audio Visual 3. Telaah Kurikulum 4. Pengantar Ilmu Sosial 5. Microteaching Sosiologi 6. Evaluasi Pembelajaran Sosiologi 7. Literasi Digital dan Kemanusiaan 8. Pendidikan Pancasila 9. Pendidikan Kewarganegaraan

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Semarang	Universitas Negeri Semarang
Bidang Ilmu	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Tahun Masuk-Lulus	2006-2011	2012-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implementasi Pembelajaran Sosiologi Kelas X di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri (Studi Kasus di SMA N 1 Ungaran dan SMA N 14 Semarang Tahun Ajaran 2010-2011)	Konstruksi Gender di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Kecamatan Sirampog Brebes
Nama Pembimbing	1. Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum.	1. Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum.

	2. Dr. Eko Handoyo, M.Si.	2. Dr. Eko Handoyo, M.Si.
--	------------------------------	---------------------------

Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2015	<i>Garuda Mobile Apps</i> Aplikasi Berbasis Android Sebagai Pengembangan Media Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	DIPA Unnes	10.000.000,-
2	2015	Profil dan Perkembangan Usaha Bordir di Kecamatan Nalum Sari Kabupaten Jepara (Studi di Dua Desa Nalum Sari dan Karang Nongko)	DIPA FIS Unnes	15.000.000,-
3	2016	<i>Children Care Mainstreaming</i> sebagai Upaya Mengatasi Kekerasan pada Anak di Kota Semarang	DIPA Unnes	12.000.000,-
4	2016	Pola Perilaku Pengusaha Bordir dan Konveksi di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	DIPA FIS Unnes	20.000.000,-
5	2017	Menemukan Adopsi Model Relasi Dalam Rekayasa Sosial Berbasis Konservasi: Belajar dari Recipient dalam CSR Pertamina Foundation di Boyolali	DIPA FIS Unnes	5.000.000,-
6	2017	<i>Live in Designer and Publisher:</i> sebagai Model Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus	DIPA FIS Unnes	20.000.0000
7	2018	Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Eduwisata Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati	DIPA FIS UNNES	21.000.000,-
8	2018	Etnoepidemiologi Anak Balita dalam Konteks Kosmologi Jawa	DIPA FIS UNNES	7.700.000,-
9	2019	Pengembangan Model Sekolah "Tapal Batas" di Kalimantan Utara Bagi Anak-Anak TKI yang Dilarang Bersekolah di Sabah Malaysia	DIPA UNNES	30.000.000,-
10	2019	Efektivitas Mata Kuliah	DIPA FIS	20.000.000,-

		Kewirausahaan Terhadap Pola Perilaku Wirausaha Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial di Era Revolusi Industri 4.0	UNNES	
11	2019	Mengkaji Aktivitas Illegal Fishing di Pantai Utara Jawa dan Solusinya	DIPA FIS UNNES	7.000.000,-
12	2020	Menjaga Ekosistem Telaga Ranjeng Berbasis Folklore Bermuatan Konservasi	DIPA FIS UNNES	8.500.000,-
13	2020	Model "Supercamp Candradimuka" Sebagai Arena Penguatan Prestasi dan Reputasi Internasional Mahasiswa FIS UNNES	DIPA UNNES	35.000.000,-
14	2020	Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga di Desa Medono, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal	DIPA FIS UNNES	14.000.000,-

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2013	Pelatihan Agrobisnis melalui Pemanfaatan Lahan Sempit kepada Petani di RW V Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	DIPA Unnes	7.500.000,-
2	2016	Pelatihan <i>Intensive and Children Care Parenting</i> bagi Masyarakat Pinggir Kota Lama Semarang	DIPA Unnes	7.500.000,-
3	2016	Pelatihan Pembuatan Instrumen Evaluasi Pembelajaran di SMP XXIII Yoannes Semarang	DIPA FIS Unnes	5.000.000,-
4	2017	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Pengembangan Website bagi UMKM Center Kota Semarang	DIPA FIS Unnes	3.000.000,-
5	2018	Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Pelatihan Media Pembelajaran Bagi Guru di Kota Salatiga	DIPA PNBP UNNES	10.000.000,-
6	2018	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dan Jurnalistik Bagi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Untuk Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal	DIPA FIS UNNES	4.000.000,-
7	2018	Penguatan Karakter	DIPA FIS	4.500.000,-

		Enterpreneuership Wirausahawan Muda Fakultas Ilmu Sosial	UNNES	
8	2019	Pelatihan Penyusunan Bussiness Plan Guna Mendorong Pengembangan Start-Up Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial	DIPA FIS UNNES	5.000.000,-
9	2019	Pengembangan Media Pembelajaran IPS untuk Rintisan Laboraturium Terpadu bagi Guru IPS di MTS Muallimin dan MTS Muallimat Nahdatul Wathan Pancor	DIPA FIS UNNES	3.500.000,-
11	2020	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah bagi Guru SMP N 41 Semarang	DIPA UNNES	9.500.000,-
12	2020	Optimalisasi Model Pelatihan Terpadu dalam Penyusunan ebook Pembelajaran sebagai Implementasi Papperless bagi Guru di SMPN 41 Semarang	DIPA UNNES	9.000.000,-
13	2020	Optimalisasi Model Pembelajaran Student Centered Learning Melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Guna Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SD Negeri Brangang	DIPA FIS UNNES	3.000.000,-
14	2020	Pengembangan Media Pembelajaran Inovatif bagi Guru di Pondok Pesantren Ainus Syamsi Kabupaten Maros	DIPA FIS UNNES	3.000.000,-

Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Artikel	Nama Seminar	ISSN Prosiding
1.	2018	<u>Dekonstruksi Relasi Pendidik-Peserta Didik Menuju Spirit Takdziman Wa Takriman sebagai Modal Dasar Penguatan Pendidikan Karakter</u>	<u>Seminar Nasional "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Guna Mempersiapkan Daya Saing Kompetens</u>	<u>978-602-6697-21-9</u>
2	2018	<u>Cantrang Fish Net Ban, Illegal Fishing, And Ship</u>	<u>International Conference On</u>	=

		<u>Sinking In Indonesia</u>	<u>Malaysia-Indonesia (Pahmi12)</u>	
3	2018	<u>Optimalisasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Melalui Pelatihan Media Pembelajaran Bagi Guru Di Kota Salatiga</u>	<u>SNK-PPM UNNES-UNDIP 2018</u>	ISSN 2655-6235
4	2018	<u>Optimalisasi Self-Publishing Dalam Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Publikasi Karya Bagi Guru di Kota Salatiga</u>	<u>SNK-PPM UNNES-UNDIP 2018</u>	ISSN 2655-6235
5	2019	<u>Relationship of Illegal Fishing Activities and Sea Resources Conservation Strategies</u>	<u>The 1st International Conference on Environment and Sustainability Issues</u>	<u>ISBN 978-1-63190-215-4</u> <u>ISSN 2593-7650</u>
6	2019	<u>The Conservation Values Integration Model in Scientific Approach of Civics in College</u>	<u>5th International Conference on Science, Education and Technology, ISET 2019</u>	<u>978-1-63190-216-1</u>
7	2020	<u>A Teacher's Perception of Government Policy About the Mover Teacher</u>	<u>ISET 2020 International Conference on Science, Education and Technology</u>	=
8	2020	<u>Maintaining Telaga Ranjeng Nature Reserve Ecosystem Based on Conservation Folklore</u>	<u>The 3rd International Conference on Rural Studies in Asia (ICORSIA) 2020</u>	-
9	2020	<u>Coaching From Afar: Strategies For Strengthening Student Achievement And Reputation In The New Normal Era</u>	<u>The 3rd International Conference on Rural Studies in Asia (ICORSIA) 2020</u>	-
10	2020	<u>Women's Roles in Household Economy in Medono Village, Boja Sub-district, Kendal District</u>	<u>The 3rd International Conference on Rural Studies in Asia (ICORSIA) 2020</u>	-

Buku yang Ditulis dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Pendanaan	
			Penerbit	ISBN
1	2016	Catatan Akhir Perkuliahan: Nasionalisme dalam Tulisan (Penyusun)	LP3 UNNES	978 602 805 499 7
2	2021	Melihat Perspektif: Memahami Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran (Chapter)	LP2M UNNES	978-623- 66868-3-6

Pelatihan yang Pernah Diikuti dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Buku	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2016	Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti)	LP3 UNNES	-
2	2018	<i>Applied Approach</i>	LP3 UNNES	-

Pengalaman Menulis Artikel Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Artikel	Jurnal	ISSN
1.	2018	<i>The Authority of Kyai Toward the Santri: A Review of Gender Construction at Pondok Pesantren</i>	Jurnal Komunitas	2086- 5465
2.	2018	<i>Children Care Mainstreaming sebagai Upaya Mengatasi Kekerasan pada Anak di Kota Semarang</i>	Jurnal Dimensia	2654-9344
3.	2017	Menemukan Adopsi Model Relasi dalam Rekayasa Sosial Berbasis Konservasi: Belajar dari Recipient dalam CSR Pertamina Foundation di Boyolali	Jurnal Forum Ilmu Sosial	2549-0745
4	2019	Peningkatan Karakter Enterpreunership Wirausahawan Muda Fakultas Ilmu Sosial	Jurnal Forum Ilmu Sosial	2549-0745
5	2020	<i>Exploiting of Natural Resources as Livelihoods of The Border Citizens in The Sebatik Island, North Kalimantan</i>	Jurnal Komunitas	2086-5465
6	2020	Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dan Jurnalistik Bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Kendal	Jurnal Puruhita	2655-9668
7	2020	Dari Salaman ke Senyuman:	Jurnal	2528-1569

		Dampak Kebijakan Kesehatan Global terhadap Komunitas Lokal di Era Pandemi	Umbara	
8	2020	Pelatihan Optimalisasi Model Pembelajaran Student Centered Learning melalui Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Guna Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SD Negeri Branjang	Jurnal Implementasi	2460-7320
9	2020	Pelatihan Penyusunan Evaluasi Pembelajaran Berbentuk Portofolio sebagai Implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Bagi Guru SMP N 41 Semarang	Jurnal Implementasi	2460-7320
10	2020	Optimalisasi Model Pelatihan Terpadu dalam Penyusunan Ebook Pembelajaran sebagai Implementasi Paperless Bagi Guru di SMPN 41 Semarang	Jurnal Implementasi	2460-7320

Pengalaman Memperoleh HAKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Rumah Ilmu Rumah Kita	2018	Buku (Hak Cipta)	000106177
2	Parikan Konservasi	2018	Buku (Hak Cipta)	000106289
3	Nasionalisme dalam Tulisan	2018	Buku (Hak Cipta)	000106178
4	Pendidikan Kewarganegaraan	2020	Video Pembelajaran	000184588
5	Enterpreneurship Idea	2020	Video Pembelajaran	000195997

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat diperanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan usulan penelitian ini.

Semarang, 24 Februari 2021
Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Didi Pramono', is written over a light green rectangular background.

Didi Pramono, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1988120120160811007